

**ANALISIS PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD)  
dan IDM (INDEKS DESA MEMBANGUN) di KABUPATEN  
MANDAILING NATAL TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Ekonomi Pembangunan*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**Nama** : ANDRI MUHAMMAD IDRIS  
**Npm** : 1705180036  
**Program Studi** : EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Srata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, pukul 08.00 Wib sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama Lengkap : ANDRI MUHAMMAD IDRIS  
NPM : 1705180036  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD) DAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2020  
Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si.)

Penguji II

(ERİYANTY NASUTION., SE., M.Si)

Pembimbing

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE., M.Si)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

  
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

  
(Assoc.Prof.Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ANDRI MUHAMMAD IDRIS  
NPM : 1705180036  
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Alamat Rumah : Jl. PASAR III KOMPLEK TAMAN PASAR III NO. A 14  
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN  
DESA (IPD) DAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI  
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2020

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, MM, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Muhammad Idris  
NPM : 1705180036  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Judul Skripsi : Analisis Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 17 November 2021

Yang membuat pernyataan



ANDRI MUHAMMAD IDRIS

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr.Wb*

Puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang merupakan persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi program Sarjana S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah di muka bumi, semoga kelak kita di berikan syafatnya di kemudian hari. Amin ya Robbal Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tersayang yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang beriring do'a yang senantiasa mengiringi langkah kaki ini serta memberikan motivasi, moral, maupun materi, dan juga kepada :

1. Bapak H. Januri S.E.,M.M.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E.,M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS. S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu dra. Roswita Hafni, M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Prawdiya Hariani RS selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini.
7. Ayah Tercinta dan ibunda tercinta yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staff pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah selalu membantu saya dalam urusan administrasi di perkuliahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis Proposal ini.Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan.Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat,

menambah pengetahuan bagi kita semua, *Aamiin...ya Rabbal Alaamiin...*  
*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Medan, 28 September 2022

Andri Muhammad Idris

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan IDM (Indeks Desa Membangun) Di Kabupaten Mandailing Natal Tahun. Metode penelitian Kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dana desa paling besar di Sumatera Utara. Dimana pada tahun 2016 kabupaten Mandailing Natal mendapat alokasi dana desa sebesar Rp. 222.908.920.000 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 284.048.518.000 Hingga pada tahun 2020 mencapai Rp. 290.920.103.000. Dalam kategori Indeks Desa Membangun rata-rata nilai Kabupaten Mandailing natal sebesar 0.5693 atau dalam kata lain masuk dalam kategori Tertinggal. Sedangkan, Dimensi IPD Sumatera Utara Tahun 2018 dapat dianalisis bahwa Kabupaten Mandailing Natal dengan total Desa sebanyak 377 Desa memiliki sistem Pelayanan Dasar yang mencapai taraf 53,77 dengan Kondisi Infrastruktur sebesar 37,09 serta tingkat Aksesibiliti/Transportasi sebesar 82,03 dan Pelayanan Umum memiliki taraf 50,62 dan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang sudah berjalan sebesar 60,09.

***Kata Kunci :Dana Desa, Indeks Desa Membangun, Indeks Pembangunan Desa***



## ABSTRACT

This study aims to analyze the Development of the Village Development Index (IPD) and IDM (Development Village Index) in Mandailing Natal District. Qualitative descriptive research method using primary and secondary data. The results of this study indicate that Mandailing Natal Regency is one of the districts that receive the largest village fund budget in North Sumatra. Where in 2016 Mandailing Natal district received a village fund allocation of Rp. 222,908,920,000 and in 2017 it was Rp. 284,048,518,000 Until 2020 it reaches Rp. 290.920.103.000. In the Developing Village Index category, the average value of the Mandailing Natal Regency is 0.5693 or in other words it is in the Lagging category. Meanwhile, the North Sumatra IPD Dimension in 2018 can be analyzed that Mandailing Natal Regency with a total of 377 Villages has a Basic Service system that reaches a level of 53.77 with an Infrastructure Condition of 37.09 and an Accessibility/Transportation level of 82.03 and Public Services has a level of 50.62 and the implementation of Government Administration that has been running is 60.09.

***Keywords: Village Fund, Village Building Index, Village Development Index***

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	18
1.3 Batasan masalah .....	19
1.4 Rumusan masalah.....	19
1.5 Tujuan penelitian.....	19
1.6 Manfaat Penelitian .....	20
1.6.1 Akademik .....	20
1.6.2 Non Akademik .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
2.1 Landasan Teoritis .....	21
2.1.1 Teori Pembangunan ekonomi.....	21
2.1.2 Teori Pendapatan Nasional.....	36
2.1.3. Pengeluaran Pemerintah .....	40
2.1.4. Regulasi .....	46
2.2 Penelitian Terdahulu .....	51
2.3 Kerangka Konseptual .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	53
3.2 Tempat dan waktu penelitian .....	53
3.2.1 Tempat penelitian .....	53
3.2.2 Waktu penelitian.....	53
3.3 Jenis dan Sumber data.....	54
3.3.1 Teknik pengumpulan data .....	54
3.4 Teknik analisis data.....	54
3.4.1 Metode analisis deskriptif .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal.....	56

4.1.1. Gambaran Geografi Kabupaten Mandailing Natal.....	56
4.1.2. Kondisi Topografi Kabupaten Mandailing Natal .....	58
4.1.3. Perkembangan Indikator sosial .....	59
4.1.4. Perkembangan Indikator Ekonomi .....	64
4.2. Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Kabupaten Mandailing Natal .....	67
4.3. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) Pada Wilayah Kabupaten Mandailing Natal.....	73
4.3.1. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Pada Wilayah Kabupaten Mandailing Natal.....	73
4.3.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) Pada Wilayah Pedesaan Di Kabupaten Mandailing Natal .....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
<b>5.1. Kesimpulan .....</b>	<b>85</b>
<b>5.1. Saran .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Pengalokasian Dana Desa di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2020 .....	16
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	17
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	51
Tabel 4.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, 2020 .....	59
Tabel 4.2 Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, 2020 .....	61
Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal (Miliar Rupiah) 2015-2019....	64
Tabel 4.4 Transfer ke Daerah dan Dana Desa Kabupaten Mandailing Natal 2019 – 2021.....	68
Tabel 4.5 Alokasi Dana Desa Kabupaten di Sumatera Utara tahun 2015 - 2020 .	70
Tabel 4.6 Indikator Variabel Dimensi Indeks Membangun Desa (IMD) .....	75
Tabel 4.7 Indeks Membangun Desa (IDM) Pada Kabupaten Mandailing Natal ..	76
Tabel 4.9 Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) Sumatera Utara Tahun 2014 .....	81
Tabel 4.10 Indeks Pembangunan Desa (IPD) Sumatera Utara Tahun 2018 .....	82
Tabel 4.11 Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) Sumatera Utara Tahun 2018 .....	83

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 2.1 Pengeluaran Pemerintahan Pada Keynesian Cross.....	42
Grafik 2.2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner.....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk menciptakan kesejahteraan dan memberikan alternatif kehidupan kepada masyarakat yang lebih luas. Pembangunan dapat disebabkan oleh dorongan yang berasal dari kebudayaan dan akan berakibat kepada masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut pembangunan Indonesia merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dilakukan mulai dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program, kegiatan program, pengawasan sampai pada program terselesaikan.

Menurut Todaro (2015), pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan. Sedangkan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau pemberantasan kemiskinan yang absolut.

Pandangan-pandangan para ekonom mengenai aspek yang berkaitan dengan masalah pembangunan di negara-negara sedang berkembang itulah yang disebut sebagai ekonomi pembangunan. Pola pembahasan dalam analisis teori ekonomi mikro dan ekonomi makro yang mempunyai bentuk seragam tidak akan ditemukan dalam analisis ekonomi pembangunan. Cabang ilmu ekonomi ini

belum memiliki suatu pola analisis tertentu yang dapat diterima oleh kebanyakan ekonomi.

Sejalan dengan bertambah besarnya perhatian yang diberikan dalam membangun negara-negara berkembang maka makin meluas pula kesadaran bahwa tugas membangun negaranegara itu bukanlah tugas yang sederhana dan mudah. Masalah pembangunan ekonomi negara-negara berkembang merupakan suatu persoalan yang sangat kompleks dan sangat berlainan sifatnya dengan masalah pembangunan yang pernah dihadapi oleh negara-negara maju. Sangat kompleksnya masalah pembangunan dan banyaknya faktor penyebab terpenting dari keadaan tersebut; menyebabkan topik yang dianalisa dalam ekonomi pembangunan meliputi bidang yang sangat luas sekali. Faktor lainnya adalah ketiadaan teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi sampai saat sekarang belum mencapai konsensus mengenai faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan bagaimana proses pembangunan ekonomi berlaku.

Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Di samping itu kesejahteraan masyarakat juga akan bertambah karena pembangunan ekonomi telah dapat menambah kesempatan bagi masyarakat mengadakan pilihan yang lebih luas.

Ada beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab dari bertambah meluasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi antara lain:

1. Berkembangnya keinginan untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi. Beberapa negara seperti Indonesia, Myanmar, Pakistan, Negaranegera Afrika, dan sebagainya bukan saja merupakan negara-negara yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, tetapi juga merupakan negara yang di mana masalah jumlah penduduk sangat serius sekali keadaannya. Oleh karena itu, mengadakan pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut merupakan suatu keperluan yang sangat mendesak, yaitu untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.
2. Perhatian terhadap masalah pembangunan negaranegara berkembang juga berasal dari negara-negara yang sudah maju, karena ada beberapa pertimbangan yaitu perasaan perikemanusiaan yaitu keinginan untuk membantu negara-negara berkembang agar dapat mempercepat pembangunan ekonomi mereka dan mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara maju dan untuk mendapat dukungan politik, seperti perhatian yang sering diberikan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara berkembang.

Pembangunan ekonomi juga memberikan suatu kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih. Di dalam perekonomian yang masih primitif orang dipaksa bekerja keras hanya untuk mempertahankan hidupnya sekedar untuk tidak mati. Dengan pembangunan ekonomi akan tersedia lebih banyak barang-barang pemuas kebutuhan dan juga lebih banyak kesempatan untuk hidup bersenang-senang dan istirahat yang lama. Pembangunan ekonomi juga memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat perikemanusiaan, karena makin



banyaknya sarana yang tersedia. Selanjutnya, dengan pembangunan ekonomi diharapkan akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara yang sudah maju.

Tidak semua pembangunan ekonomi memberikan manfaat bagi semua orang. Ada orang yang menganggap bahwa tingkah laku dan lembaga-lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi adalah kurang baik dan malahan tidak diinginkan. Mereka ini hanya tetap menghendaki lembaga-lembaga yang statis. Pertama-tama mereka tidak menyukai adanya semangat ekonomis, semangat penghematan. Justru semangat inilah yang sebenarnya merupakan salah satu syarat untuk dapat dilaksanakannya pembangunan ekonomi. Orang harus berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang ekonomis, baik dalam produksi maupun dalam konsumsi. Ia harus selalu berusaha untuk menggunakan kesempatan dan faktor-faktor produksi yang dimiliki seefisien mungkin.

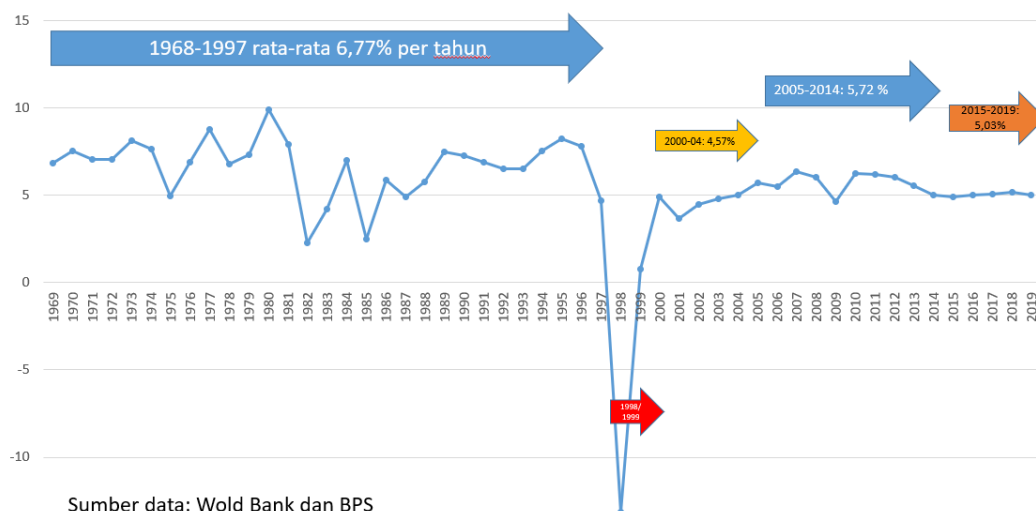
Pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk mencerminkan perkembangan ekonomi yang terjadi di negara-negara yang sudah maju, sedangkan pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang. Akhirnya, suatu perekonomian baru dapat dinyatakan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan yang menaik. Namun demikian tidaklah berarti bahwa pendapatan perkapita akan mengalami kenaikan terus menerus. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik, dan kemunduran ekspor, misalnya dapat mengakibatkan suatu perekonomian mengalami kemunduran tingkat kegiatan ekonominya. Jika keadaan demikian hanya bersifat temporer, dan kegiatan ekonomi secara rata-rata

meningkat dari tahun ketahun, maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan mengalami pembangunan ekonomi.

Sebagai Negara berkembang sejak tahun 1969 Indonesia gencar melakukan pembangunan secara terencana dan bertahap. Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan ekonomi merupakan bagian penting dari pembangunan nasional secara menyeluruh sebagai tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nugroho, 2009). Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu hal yang umum jika perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan (Nugroho, 2009).

Adapun laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan menurut Lapangan Usaha tahun 1990-2004 adalah sebagai berikut :

**Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 1969 - 2019**



Sumber : World Bank, 2019

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami fluktuasi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 berimbas kepada menurunnya pertumbuhan ekonomi secara drastis ke angka 13,12 %. Banyak upaya yang pemerintah lakukan melalui kebijakan-kebijakan yang ditempuh berhasil memulihkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai stabil dan beranjak naik sedikit demi sedikit di tahun berikutnya. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami guncangan pada tahun 2009 yaitu mengalami penurunan dari 6,01% menjadi 4.63% akibat dari krisis global tahun 2008. Pemerintah segera mengambil tindakan cepat untuk melakukan pemulihan ekonomi yang pada akhirnya mampu membangkitkan perekonomian Indonesia.

Dalam melakukan percepatan pembangunan banyak cara yang dilakukan pemerintah salah satunya yaitu, kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan didaerahnya dan diharapkan setiap daerah memiliki kemandirian sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Kebijakan otonomi daerah Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan atas UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kedua UU tersebut maka otonomi daerah dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, daerah

diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan yang dimilikinya, termasuk konsekuensi kewajiban-kewajibannya, dengan tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan hal yang spesial yang dimiliki oleh daerah lokal yang ada di masyarakat masing-masing daerah. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah daerah bisa mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata sehingga juga bisa mendorong perekonomian yang ada di daerah itu. Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya dari pada pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia telah dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2001 bertumpu pada alokasi pusat kepada daerah yang dikenal sebagai dana perimbangan. Selama hampir 10 (sepuluh) tahun berjalannya desentralisasi fiskal, telah dialokasikan secara signifikan dana perimbangan ke daerah, dalam bentuk Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), baik yang berasal dari pajak maupun sumber daya alam.

Dana Transfer ke Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

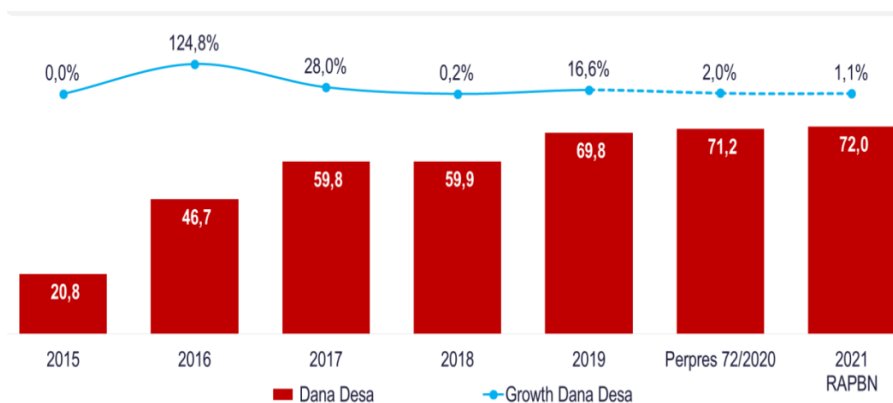
Disamping itu, pada saat ini kebijakan Transfer ke Daerah tidak hanya berfokus pada pemerintah Provinsi. Namun, saat ini pembangunan daerah dan desa juga merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Jokowi sebagaimana tercantum dalam Nawa cita “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Pembangunan desa atau daerah saat ini sudah jelas menjadi prioritas pemerintah Indonesia terbukti dengan lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Adanya prioritas pembangunan wilayah desa ini dapat memberikan banyak manfaat, salah satunya mengurangi terjadinya migrasi penduduk desa ke wilayah kota. Hal ini dapat terjadi dengan adanya pembangunan infrastruktur desa, baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi dan lainnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Undang-undang desa juga mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa untuk diberikan kepada desa. Kebijakan dana desa adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta masyarakat Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007, Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan dana desa yang besarnya sekitar 1 Miliar rupiah per desa untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya diperuntukan untuk membangun desa dan diharapkan masyarakat desa untuk mengembangkan desanya.

**Gambar 1.2. Perkembangan Anggaran Dana Desa tahun 2015 - 2021**



Sumber : kemenkeu.go.id, 2021

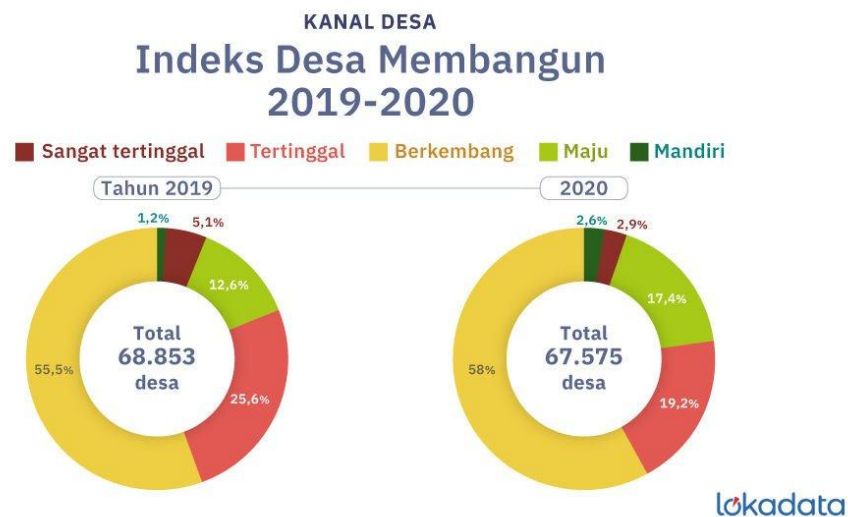
Dari data diatas dapat dilihat bahwa anggaran dana desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 anggaran desa hanya sebesar 20,8 triliun rupiah, mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 59,9 triliun dan 2019

sebesar 69,8 triliun rupiah hingga pada tahun 2021 diketahui total anggaran dana desa mencapai 72 triliun rupiah untuk seluruh desa yang ada di Indonesia.

Pembangunan Desa menjadi bagian penting yang menjadi target pemerintah, tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Tujuan pembangunan desa ini untuk mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa ditahun 2019. Pada awal RPJMN, pemerintah telah memetakan jumlah wilayah administrasi desa yang teregistrasi melalui Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015 yang jumlahnya mencapai 74.093 desa.

Dalam melihat perkembangan wilayah desa ada dua indikator yaitu, IDM (Indeks Membangun Desa) da Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Gambar 1.3. Indeks Desa Membangun 2019-2020

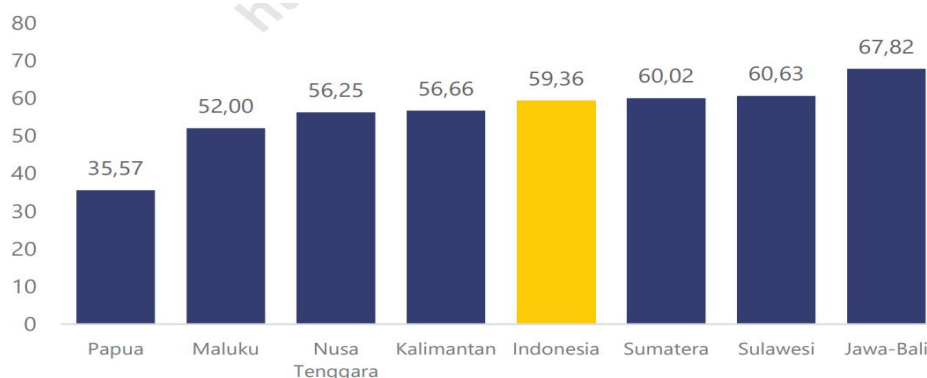


Sumber : lokadata.com

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2019-2020 kondisi desa di Indonesia kondisi desa mengalami perkembangan. Dimana, dapat kita

lihat apabila tahun 2019 desa sangat tertinggal sebesar 5,1% pada tahun 2020 turun menjadi 2,9% dan pada desa tertinggal pada tahun 2019 presentase sebesar 25,6% pada tahun 2020 menurun menjadi 19,2% dan desa berkembang pada tahun 2019 sebesar 55,5% dan tahun 2020 naik sebesar 58%. Selanjutnya, untuk kategori desa maju dan mandiri juga mengalami peningkatan dimana kategori desa maju pada tahun 2019 sebesar 12,6% dan tahun 2020 sebesar 17,4% serta kategori desa mandiri pada tahun 2019 sebesar 1,2% dan tahun 2020 menjadi 2,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa desa di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan.

**Gambar 1.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Desa**



Sumber : BPS Indeks Pembangunan Desa ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Secara nasional, tahap perkembangan desa di Indonesia dalam kategori desa berkembang dengan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 59,36. Hasil rata-rata indeks pada tingkat pulau menunjukkan ada tiga pulau yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa nasional (59,36). Ketiga pulau tersebut adalah pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa-Bali. Sementara empat pulau lain berada di bawah rata-rata nasional yaitu Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.



Nilai IPD paling besar terdapat di Pulau Jawa-Bali (67,82). Sementara indeks paling rendah terdapat di Pulau Papua (35,57). Dilihat dari tingkat perkembangannya, 73,40 persen desa di Indonesia pada umumnya termasuk dalam kategori desa berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar pulau yang rata-rata indeksnya masuk dalam kategori desa berkembang. Pulau-pulau tersebut antara lain: Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sementara Pulau Papua rata-rata perkembangan desanya masih dalam kategori desa tertinggal.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serta kebijakan dana desa mempengaruhi perkembangan seluruh wilayah di Indonesia salah satunya yaitu Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang merupakan salah satu Provinsi yang berada di bagian barat Indonesia, terdapat 18 Kabupaten, 5 Kota, 289 kecamatan dan 6497 Kelurahan setelah adanya otonomi daerah pada tahun 1999. Sumut adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Pengakuan negara atas Sumut terakhir diberikan melalui Undang-undang nomor 11 tahun 2000 tentang pemerintahan Sumut (LN 2000 no 26, TLN 4633). UU pemerintahan Sumut ini tidak lepas dari nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).

- 1) Pemerintahan Sumut adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Sumut dan DPRD Sumut sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

- 2) Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Sumut berdasarkan UU pemerintahan Sumut ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
- 3) Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.

Akibat dari kebijakan otonomi daerah tersebut berdampak terhadap pemekaran beberapa wilayah di Provinsi Sumut yang salah satunya yaitu pemekaran Kabupaten Mandailing Natal dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonomi daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatera Utara, wilayah Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ibukota Padangsidempuan dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan. Sedangkan Kabupaten Mandailing , meliputi wilayah Penyabungan.

Kabupaten Mandailing Natal yang beribukota Penyabungan ini pada tanggal 23 september 1999 mengalami pemekaran. Pemekaran wilayah tersebut menyebabkan perubahan sosial ekonomi Kabupaten Mandailing secara menyeluruh, yang meliputi : pembagian luas wilayah administrasi, sumber daya, infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi wilayah, serta sektor pemerintahan.

Dari aspek ekonomi, pemekaran ini dapat mendorong kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya melalui optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Berikut dapat kita lihat kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016-2020.

**Tabel 1.1**  
**Produk Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Mandailing Natal 2016 dan 2020**

Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (Milyar Rupiah)				
	2020	2019	2018	2017	2016
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6028.32.00	5819.71	5497.99	5158.32.00	4689.25.00
B. Pertambangan dan Penggalian	84.12.00	83.43.00	77.08.00	72.91	71.62
C. Industri Pengolahan	1582.25.00	1550.42.00	1426.42.00	1302.82	1123.50.00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,438194444	09.51	09.05	08.30	07.40
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,138194444	0,138194444	02.58	02.43	02.22
F. Konstruksi	1799.72	1839.81	1671.49.00	1511.68	1381.69
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2002.54.00	1968.61	1795.71	1637.61	1493.89
H. Transportasi dan Pergudangan	254.93	260.40.00	244.23.00	225.54.00	214.99
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	94.78	100.86	93.55.00	85.91	81.36.00
J. Informasi dan Komunikasi	92.46.00	89.12.00	87.13.00	81.75	76.76

K. Jasa Keuangan dan Asurans	180.81	180.66	174.17.00	168.34.00	159.89
L. Real Estat	370.23.00	351.53.00	336.52.00	311.19.00	295.39.00
M. Jasa Perusahaan	0,586805556	13.51	12.53	0,525	11.01
N. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1035.58.00	1001.95	931.82	894.80	826.34.00
O. Jasa Pendidikan	171.48.00	160.91	153.21.00	142.60	134.29.00
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114.95	107.04.00	100.46.00	92.51.00	86.97
Q. Jasa lainnya	04.48	04.48	04.11	0,183333333	03.48
PDRB	13843.00	13544.74	12618.05	11712.51	10660.04

Sumber: BPS Mandailing Natal, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Mandailing Natal mengalami peningkatan setelah adanya kebijakan fiskal. Dimana pada tahun 2016 nilai PDRB Kabupaten Mandailing Natal sebesar 10660.04 (miliar rupiah) sedangkan pada tahun 2020 sebesar 13.843,00 (milyar rupiah). Kemudian sektor lapangan usaha yang paling banyak memberikan kontribusinya terhadap PDRB tersebut adalah Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan. Dengan memberikan kontribusi sebesar 4689.25.00 (miliar rupiah) pada tahun 2016 dan 6028.32.00 (miliar rupiah) pada tahun 2020.

Menurut Data yang dikutip oleh Dirjen Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara pertama sekali menerima Dana Desa sebesar Rp 1,46 triliun pada tahun 2015. Jumlah Dana Desa tersebut terus meningkat secara fantastis hingga mencapai Rp. 4,45 triliun pada tahun 2019. Secara rinci dalam paparan Kemenkeu Tahun 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 4,5 triliun untuk 5.417 Desa. Dan mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp.

7.915.875.054.000 (dalam ribuan). Pengalokasian dana desa di provinsi Sumut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 1 1 Pengalokasian Dana Desa di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2020**

Nama Daerah	Jumlah Desa	Dana Desa (dalam ribuan rupiah)		
		2019	2020	2021
Kab. Asahan	177	146.090.415	150.506.325	152.083.710
Kab. Dairi	161	127.172.564	130.304.470	129.738.730
Kab. Deli Serdang	380	306.386.948	312.277.329	312.546.966
Kab. Karo	259	197.078.926	201.208.286	198.409.273
Kab. Labuhan Batu	75	70.226.102	72.182.696	74.477.417
Kab. Langkat	240	205.446.268	211.213.265	213.259.749
Kab. Mandailing Natal	377	285.841.420	290.920.103	286.845.864
Kab. Nias	170	180.585.127	181.381.215	179.544.025
Kab. Simalungun	386	294.442.204	298.689.733	296.800.840
Kab. Tapanuli Selatan	211	167.751.279	172.034.790	169.754.513
Kab. Tapanuli Tengah	159	140.541.973	144.349.335	142.631.022
Kab. Tapanuli Utara	241	184.186.164	194.621.304	192.016.817
Kab. Toba Samosir	231	176.101.238	179.571.269	177.074.852
Kab. Pakpak Bharat	52	48.298.630	50.424.120	50.970.983
Kab. Nias Selatan	459	348.422.333	356.099.164	351.138.751
Kab. Humbang Hasundutan	153	123.336.297	126.028.454	124.934.505
Kab. Serdang Bedagai	237	184.774.302	187.834.594	185.739.448
Kab. Samosir	128	108.744.499	109.313.044	107.929.748
Kab. Batu Bara	141	118.843.171	121.634.028	121.071.737
Kab. Padang Lawas	303	230.097.858	233.549.721	230.275.200
Kab. Padang Lawas Utara	386	287.244.660	293.516.929	289.345.427
Kab. Labuhan Batu Selatan	52	61.548.371	65.076.224	67.788.110
Kab. Labuhan Batu Utara	82	79.123.527	83.576.158	86.022.841
Kab. Nias Utara	112	137.008.319	137.596.573	136.386.189
Kab. Nias Barat	105	114.000.248	118.531.988	117.397.253

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan 2020 ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id))

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang menerima anggaran dana Desa tahun 2021 terbesar berturut-turut adalah Kabupaten Nias Selatan (Rp.304.227.954), Kabupaten Deli Serdang

(Rp.251.866.280), Kabupaten Simalungun (Rp.255.843.116), Kabupaten Padang Lawas Utara (Rp. 255.843.116), dan Kabupaten Mandailing Natal (Rp. 249.877.862). Menarik untuk diamati karena dari kelima daerah tersebut Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten yang menerima alokasi dana Desa terbesar.

Besarnya alokasi dana desa yang diterima oleh Kabupaten Mandailing Natal dapat menjadi salah satu peluang besar bagi Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan pembangunan daerahnya. Salah satu indikator pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berikut ini merupakan IPM kabupaten di Sumatera Utara.

**Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara**

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
01 Nias	60,82	61,65	61,93
<b>02 Mandailing Natal</b>	<b>65,83</b>	<b>66,52</b>	<b>66,79</b>
03 Tapanuli Selatan	69,10	69,75	70,12
04 Tapanuli Tengah	68,27	68,86	69,23
05 Tapanuli Utara	72,91	73,33	73,47
06 Toba	74,48	74,92	75,16
07 Labuhanbatu	71,39	71,94	72,01
08 Asahan	69,49	69,92	70,29
09 Simalungun	72,49	72,98	73,25
10 Dairi	70,89	71,42	71,57
11 Karo	73,91	74,25	74,43
12 Deli Serdang	74,92	75,43	75,44
13 Langkat	70,27	70,76	71,00
14 Nias Selatan	60,75	61,59	61,89
15 Humbang Hasundutan	67,96	68,83	68,87
16 Pakpak Bharat	66,63	67,47	67,59
17 Samosir	69,99	70,55	70,63
18 Serdang Bedagai	69,69	70,21	70,24
19 Batu Bara	67,67	68,35	68,36
20 Padang Lawas Utara	68,77	69,29	69,85

21 Padang Lawas	67,59	68,16	68,25
22 Labuhanbatu Selatan	70,98	71,39	71,40
23 Labuhanbatu Utara	71,08	71,43	71,61
24 Nias Utara	61,08	61,98	62,36
25 Nias Barat	60,42	61,14	61,51
<b>Kota</b>			
71 Sibolga	72,65	73,41	73,63
72 Tanjungbalai	68,00	68,51	68,65
73 Pematangsiantar	77,88	78,57	78,75
74 Tebing Tinggi	74,50	75,08	75,17
75 Medan	80,65	80,97	80,98
76 Binjai	75,21	75,89	75,89
77 Padangsidempuan	74,38	75,06	75,22
78 Gunungsitoli	68,33	69,30	69,31
<b>Sumatera Utara</b>	<b>71,18</b>	<b>71,74</b>	<b>71,77</b>

Sumber : BPS Sumut, 2020

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten dengan nilai IPM yang rendah dimana nilai IPM Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2019 adalah sebesar 66.52 dan pada tahun 2020 hanya sebesar 66.79. Hal tersebut menunjukkan bahwa besaran Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Kabupaten Mandailing Natal belum dapat memberikan dampak yang signifikan pada pembangunan Kabupaten Mandailing Natal.

Menurut uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Analisis Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020*”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah yang muncul yaitu:

1. Kurangnya pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.

2. Alokasi dana desa belum terealisasi dengan maksimal.
3. Pemerintah desa belum memahami bagaimana pengalokasian dana desa yang efektif.
4. Tidak meratanya tingkat pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal.
5. Belum optimalnya pemerintah daerah mengelola potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kabupaten Mandailing Natal.

### **1.3 Batasan masalah**

Dalam penelitian ini batasan masalah difokuskan pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta perkembangan capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun Desa (IDM) di Kabupaten Mandailing Natal.

### **1.4 Rumusan masalah**

1. Bagaimana perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diperoleh Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana perkembangan capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Mandailing Natal?

### **1.5 Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 - 2021.
2. Melakukan analisa tentang perkembangan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Membangun Desa di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2014 - 2018.



## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Akademik**

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dijadikan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada jurusan ekonomi pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil peneliti ini bisa dijadikan bahan kajian yang lebih luas lagi guna menyempurnahkan penelitian tentang Analisis perkembangan indeks pembangunan desa (IPD) dan indeks Desa Membangun (IDM) di kabupaten Mandailing Natal.

### **1.6.2 Non Akademik**

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini di jadikan masukan yang bermamfaat untuk mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan Analisis pembangunan wilayah desa di kawasan Kabupaten Mandailing Natal
2. Bagi *stakeholder*, hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai sebagai bahan acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang perkembangan IDM dan IPD di kabupaten Mandailing Natal

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Pembangunan ekonomi**

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum terdapat suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Todaro, 2015).

Pembangunan menurut Nugroho dan Rochman Dahuri (2004) dapat diartikan sebagai suatu upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Sedangkan menurut Tikson (2005), pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran 14 melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan,

kesehatan, perumahan, air bersih dll. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan antara lain dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekulerisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Analisa pembangunan ekonomi atau lebih dikenal dengan ekonomi pembangunan (*development economic*), merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas mengenai masalah-masalah pembangunan di negara yang sedang berkembang. Tujuan dari analisisnya adalah untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan selanjutnya mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

Beberapa pengertian dan definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli :

#### **A. Aliran Klasik**

##### **1. Adam Smith**

*Hukum Alam*, Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka

secara *agregat*. Smith pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan.

*Pembagian Kerja* adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja; penghematan waktu dalam memproduksi barang; penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga kerja melainkan dari modal.

*Proses Penumpukan Modal*. Smith menekankan, penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

*Agen Pertumbuhan*, menurutnya para petani, produsen dan pengusaha, merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Pada waktu terjadi surplus pertanian sebagai akibat pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikaan meningkat pula; ini semua akan membawa kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Pada pihak lain, pembangunan sektor tersebut akan meningkatkan produksi pertanian apabila petani menggunakan teknologi yang canggih. Jadi pemupukan modal dan

pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen dan pengusaha.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat komulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus menerus. Di lain pihak naiknya produktifitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena Sumber Daya Alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan.

Kelemahan Teori Adam Smith

- a. Pengabaian masyarakat secara luas
- b. Alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung
- c. Pengabaian pengusaha (wiraswasta)

**a. David Ricardo**

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital. Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja dari

golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga pada tingkat keuntungan yang normal saja.

## **2. Thomas Robert Malthus**

Malthus menitikkan perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut.

*Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Menurut Malthus* pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah, menurut Teori Malthus merupakan sebab utama keternbelakangan. Untuk pembangunan, negara harus memaksimalkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Ini memerlukan kemajuan teknologi, pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil, perluasan perdagangan

internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif, dan peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum.

### 3. Teori Karl Marx

Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Kota Trier Jerman. Pemikiran Marx sangat dipengaruhi oleh Darwin dan menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan proses dialektik sejarah. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi.

1. Menurutnya berdasarkan sejarah, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap :
2. Masyarakat kumunal primitive, yang masih menggunakan alat-alat produksi sederhana yang merupakan milik kumunal. Tidak ada surplus produksi di atas konsumsi.
3. Masyarakat perbudakan, adanya hubungan antar pemilik factor produksi dan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka. Para budak diberi upah sangat minim. Mulai ada spesialisasi untuk bidang pertanian, kerajinan tangan dsb. Karena murah nya harga buruh maka minat pemilik factor produksi untuk memperbaiki alat-alat yang dimilikinya rendah. Buruh makin lama sadar dengan kesewenang-wenangan yang dialaminya sehingga menimbulkan perselisihan antara dua kelompok tersebut.
4. Masyarakat fiodal, kaum bangsawan memiliki factor produksi utama yaitu tanah.. Para petani kebanyakan adalah budak yang dibebaskan dan mereka mengerjakan dahulu tanah milik bangsawan. Hubungan ini

mendorong adanya perbaikan alat produksi terutama di sector pertanian. Kepentingan dua kelas tersebut berbeda, para feodal lebih memikirkan keuntungan saja dan kemudian mendirikan pabrik-pabrik. Banyak timbul pedagang-pedagang baru yang didukung raja yang kemudian membutuhkan pasar yang lebih luas. Perkembangan ini menyebabkan timbulnya alat produksi kapitalis dan menghendaki hapusnya system feodal. Kelas borjuis yang memiliki alat-alat produksi menghendaki pasaran buruh yang bebas dan hapusnya tariff serta rintangan lain dalam perdagangan yang diciptakan kaum feodal sehingga kemudian masyarakat tidak lagi menyukai system ini

5. Masyarakat kapitalis, hubungan produksinya didasarkan pada pemilikan individu masing-masing kapitalis terhadap alat-alat produksi. Kelas kapitalis mempekerjakan buruh . Keuntungan kapitalis membesar yang memungkinkan berkembangnya alat-alat produksi. Perubahan alat yang mengubah cara produksi selanjutnya menyebabkan perubahan kehidupan ekonomi masyarakat. Perbedaan kepentingan antara kaum kapitalis dan buruh semakin meningkat dan mengakibatkan perjuangan kelas
6. Masyarakat sosialis, kepemilikan alat produksi didasarkan atas hak milik sosial. Hubungan produksi merupakan hubungan kerjasama dan saling membantu diantara buruh yang bebas unsur eksploitasi. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat.
7. Marx meramalkan keruntuhan system kapitalis, menurutnya terjadi karena adanya :



- a. Akumulasi yang menyebabkan perbedaan kaya miskin semakin lebar
- b. Kesengsaraan, karena kemiskinan semakin luas
- c. Krisis, karena daya beli masyarakat semakin berkurang karena pendapatan buruh semakin berkurang, sehingga terjadilah kelebihan produksi atas konsumsi (over production). Harga barang-barang merosot dan produksi terpaksa ditahan.
- d. Konsentrasi, penggabungan perusahaan-perusahaan agar tidak bangkrut karena persaingan dalam masyarakat kapitalis

Menurut Karl Marx masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahap-tahap tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan juga hubungan-hubungan produksi yang telah dijelaskan di atas, namun sejarah telah membuktikan bahwa periode evolusi yang dikemukakan oleh Marx ternyata keliru. Tidak ada masa dalam sejarah masyarakat yang melalui tahapan evolusi sebagaimana yang dikemukakan Marx. Sebaliknya sebagaimana system yang diyakini oleh Marx terjadi melalui serangkaian tahapan tertentu, malah dapat terjadi dalam waktu bersamaan dan dalam masyarakat yang sama pula di saat satu wilayah dari suatu Negara sedang mengalami system yang menyerupai masyarakat fiodal, system kapitalis berlaku di wilayah lainnya dalam Negara yang sama. Jadi pernyataan bahwa tahapan dari satu system ke system berikutnya mengikuti pola evolusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx dan teori evolusi tidak dapat dibuktikan sama sekali.

## **B. Aliran Kontrarevolusi Neo-klasik / Fundamintalisme Pasar**

Menurut teori ini pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 faktor : kenaikan kuantitas & kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi), serta penyempurnaan teknologi.

### **1. Aliran Neo-Klasik**

Aliran yang menggantikan aliran klasik. Aliran ini mempelajari tingkat bunga (harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan yang akan datang). Neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diiktisarkan sebagai berikut:

#### *a. Akumulasi Kapital*

Menurut Neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan meningkatkan tingkat tabungan. Pada suatu tingkat teknik tertentu bunga menentukan tingkat investasi. Perubahan teknologi menurut Neo-klasik terutama adalah penemuan-penemuan baru yang mengurangi penggunaan tenaga buruh/ relative lebih bersifat “penghemat buruh” dari pada “penghemat capital”. Jadi kemajuan-kemajuan teknik akan menciptakan permintaan-permintaan yang kuat akan barang-barang capital.

#### *b. Perkembangan sebagai proses Gradual / terus-menerus*

Menurut Alfred Marshall bahwa perekonomian sebagai suatu kehidupan organic yang tumbuh dan berkembang perlahan-lahan sebagai proses yang gradual atau terus-menerus.

#### *c. Perkembangan sebagai proses yang harmonis dan kumulatif*

Proses yang harmonis & kumulatif ini meliputi berbagai factor dimana factor itu tumbuh bersama-sama. Misal, bila teknik produksi baru yang akan menaikkan produksi total / akan menaikkan pendapatan total dimana untuk menambah produksi dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan lebih pandai, sehingga ada kenaikan permintaan terhadap produksi itu, karena kenaikan pendapatan Marshall menggambarkan pula harmonisnya perkembangan itu karena adanya internal economies & external economies. Internal Economies timbul dari adanya mesin-mesin yang lebih luas manajemen yang lebih baik dan sebagainya sehingga ada kenaikan produksi. External economies timbul adanya kenaikan produksi pada umumnya dan ada hubungannya dengan perkembangan pengetahuan dan kebudayaan. Jadi Marshall menekankan pada adanya sifat saling ketergantungan dan komplementer dari perekonomian. Mengenai kumulatifnya menurut Alien Young bahwa berkembangnya industri itu tergantung pada baiknya pembagian kerja diantara para buruh.

*d.* Optimis terhadap perkembangan ekonomi

Kaum klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena keterbatasan sumber daya alam. Dipihak lain berpendapat bahwa adanya kemampuan manusia mengatasi keterbatasan pertumbuhan itu. Selalu akan ada kemajuan-kemajuan pengetahuan teknik secara gradual dan kontinyu dan akan selalu ada permintaan masyarakat, hal ini menimbulkan kemungkinan baru bagi buruh untuk kenaikan upah. Bagi Neo-klasik hal penting untuk pertumbuhan ekonomi ialah kemauan untuk menabung.

*e.* Aspek internasional perkembangan ekonomi tingkat perkembangan ekonomi:

- 1) Mula-mula Negara meminjam capital / impor capital.

- 2) Kemudian Negara peminjam tersebut setelah dapat menghasilkan dengan capital pinjaman tadi, membayar deviden dan bunga atas pinjaman tersebut.
- 3) Tingkat selanjutnya setelah penghasilan nasional Negara itu meningkat terus, maka sebagian dari penghasilan itu digunakan untuk melunasi utang dan sebagian lagi dipinjamkan kenegara lain yang membutuhkan.
- 4) Tingkat keempat, Negara tersebut kemudian sudah menerima deviden dan bunga lebih besar dari pada yang dibayar, jadi ada surplus. Dengan kata lain untungnya semakin sedikit dan hutangnya semakin banyak.
- 5) Akhirnya Negara itu hanya selalu menerima deviden dan bunga saja dari Negara lain.

## **2. Teori Schumpeter**

Teori Schumpeter ini pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang berbahasa Jerman pada tahun 1911 yang pada tahun 1934 diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Kemudian dia mengulas teorinya lebih dalam mengenai proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1939 dengan judul *Business Cycle*. Salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunan adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemacetan (*Satagnasi*). Pendapat ini sama dengan pendapat kaum Klasik.

Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah *proses inovasi* dan pelakunya adalah para inovator atau pengusaha. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para Pengusaha (*entrepreneurs*). Dan kemajuan ekonomi tersebut dapat dimaknai sebagai peningkatan *output* total masyarakat. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, meskipun keduanya merupakan sumber peningkatan *output* masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan *output* masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam “teknologi” produksi itu sendiri. Misalnya, kenaikan *output* yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan *output* yang disebabkan oleh adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha (*entrepreneurs*). *Inovasi disini* bukan hanya berarti perubahan yang “radikal” dalam hal teknologi, inovasi dapat juga direpresentasikan sebagai penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan sebagainya. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dan sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para pengusahanya.

Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang setiap orang untuk menciptakan hal-hal yang baru (inovasi), dan lingkungan yang paling cocok untuk itu adalah masyarakat yang menganut paham *laissez faire*, bukan dalam

masyarakat sosial ataupun komunis yang cenderung mematikan kreativitas penduduknya.

### **3. Analisis post Keynesian**

Ahli-ahli post-keynesian ialah mereka yang mencoba merumuskan perluasan teori keynes. post-keynesian memperluas sistem menjadi teori output dan kesempatan kerja dalam jangka panjang, yang menganalisa fluktuasi jangka pendek untuk mengetahui adanya perkembangan ekonomi jangka panjang.

Dalam analisis ini persoalan yang penting ialah:

- A. Syarat yang diperlukan untuk mempertahankan perkembangan pendapat yang mantap (*steady growth*) pada tingkat pendapatan dalam kesempatan kerja penuh (*full employment income*) tanpa mengalami deflasi atau inflasi.
- B. Apakah pendapatan itu benar-benar bertambah pada tingkat sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya kemacetan yang lama atau terus menerus.

### **4. Teori Harrod-Domar**

Pada hakikatnya teory Harrod-Domar merupakan pengembangan dari teory makro Keynes. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena mengungkapkan masalah – masalah ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan teory Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teory ini berusaha menunjukan syarat yang dibutuhkan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan mantab. Menurut teory Harrod-Domar, pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan

ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui proses akumulasi tabungan.

Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional. mempunyai beberapa asumsi yakni :

- A. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh ( full employment ) dan faktor – faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh .
- B. Perekonomian terdiri dari dua sector : sector rumah tangga dan sector perusahaan.
- C. Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional.
- D. Kecenderungan menabung besarnya tetap.

### **5. Teori Evsey D. Domar**

Karena investasi menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan, maka seberapa tingkat kenaikan investasi sama dengan kenaikan pendapatan dan kapasitas produksi diperlukan anggapan-anggapan teori sebagai berikut:

- A. Perekonomian sudah ada dalam pengerjaan tingkat penuh (*full employment income*)
- B. Tidak ada pemerintah dan perdagangan luar negeri
- C. Tidak ada keterlambatan penyesuaian (*lag of adjustment*)
- D. Hasrat menabung marginal dan hasrat menabung rata-rata sama.
- E. *Marginal propensity to savedan Capital coeffisien* adalah tetap.

Dari teori ini dinyatakan bahwa kenaikan investasi akan menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan. Perekonomian kenyataannya menghadapi masalah yaitu bila investasi hari ini tidak cukup maka akan terjadi pengangguran.

Bila ada investasi hari ini maka besok diperlukan investasi yang lebih banyak untuk menaikkan permintaan sehingga kapasitas produksi bertambah.

## **6. Teori Harrod**

Harrod menyelidiki keadaan perkembangan ekonomi secara terus-menerus dan cara untuk mencapai perkembangan ekonomi. Ia menyatakan bahwa tabungan sama dengan investasi ( $GC=IS$ ) dimana  $G$  adalah tingkat pertumbuhan output atau perbandingan antara naiknya income dan total income pada waktu tertentu.  $C$  adalah tambahan kapital atau perbandingan antara investasi dan kenaikan pendapatan ( $I/DY$ ) dan  $S$  adalah tabungan. Investasi dan pendapatan harus tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang mantap untuk mempertahankan pengerjaan penuh dalam jangka panjang.

Kelemahan teori Harrod-Domar adalah teori menggunakan asumsi yang sulit. Faktor-faktor penting seperti hasrat menabung dan rasio kapital output dianggap tetap, sedangkan kenyataan pada jangka panjang faktor tersebut berubah-ubah yang akan mengubah syarat yang dibutuhkan untuk adanya pertumbuhan ekonomi.

## **7. Teori Stagnasi Sekular (*Secular Stagnation*)**

Stagnasi sekuler menunjukkan suatu fase perkembangan kapitalis yang telah masak dimana tabungan bersih pada tingkat full employment cenderung bertambah, sedangkan investasi bersihnya menurun. Ini menandakan kecenderungan jangka panjang menuju pada pengurangan kegiatan ekonomi. perumusan sebab-sebab stagnasi sekuler adalah:

- A. Menitik beratkan pada peranan faktor faktor eksogen seperti teknologi, perkembangan penduduk, pembukaan dan perkembangan daerah



baru. Menurut A. Hansen, perkembangan penduduk yang cepat, pembukaan daerah baru dan kemajuan teknologi akan mendorong investasi dan menaikkan pendapatan. Menurut Keynes, perkembangan penduduk akan mendorong kenaikan ekonomi, menaikkan daya beli dan dapat memperluas pasar. Tertundanya perkembangan penduduk mengakibatkan akumulasi kapital relatif lebih banyak dari pada tenaga kerja.

- B. Menitik beratkan pada perubahan-perubahan dasar di dalam lembaga-lembaga sosial seperti meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan dan perkembangan organisasi buruh.
- C. Menitik beratkan pada faktor-faktor endogen seperti perkembangan persaingan dan konsentrasi-konsentrasi perusahaan dalam industri.

### 2.1.2 Teori Pendapatan Nasional

Menjumlahkan seluruh pendapatan agregat yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut. “Pada paruh kedua abad ke-18, Francois Quesney adalah yang pertama kali mengukur aktivitas ekonomi atas dasar aliran. Pada tahun 1758 dia mempublikasikan *Tableau Economique*, yang membahas *circular flow* dari output dan pendapatan pada berbagai sektor dalam perekonomian. Pandangannya mungkin terinspirasi dari pengetahuannya tentang aliran memutar atau *circular flow* darah dalam tubuh, Quesney adalah dokter resmi bagi king louis xv dari Prancis”. Manurung (2008).

Ukuran kasar dari pendapatan nasional dikembangkan di Inggris sekitar dua abad lalu, tetapi perhitungan rinci untuk data ekonomi mikro dikembangkan di Amerika selama *The Great Depression*. Hasil berupa sistem perhitungan

pendapatan nasional mencakup sejumlah besar data yang dihimpun dari berbagai sumber di Amerika. Data tersebut diringkas dan dirakit menjadi kerangka yang saling terkait, dan kemudian dilaporkan secara priode oleh pemerintah federal. Perhitungan pendapatan nasional Amerika adalah yang paling luas dilaporkan dan yang paling diamati di seluruh dunia. Simon Kuznets sebagai salah satu pengembang perhitungan tersebut memperoleh penghargaan hadiah nobel.

“Perhitungan pendapatan nasional adalah berdasarkan ide bahwa belanja seseorang menjadi penerimaan orang lain. Ide bahwa belanja sama dengan penerimaan ini diungkapkan dalam sistem pembukuan *double-entry*, sehingga belanja pada output agregat dicatat pada sisi buku dan pendapatan dari sumber daya dicatat pada sisi lainnya. GDP dapat diukur dengan belanja total pada produksi Amerika atau dengan pendapatan total yang diterima dari produksi tersebut. Pendekatan pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran agregat pada seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi selama satu tahun. Pendekatan pendapatan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut”. Manurung (2008)

#### **A. Metode Perhitungan GDP Berdasarkan Pengeluaran**

Seperti telah disebutkan di depan, salah satu cara untuk mengukur nilai GDP adalah dengan menjumlahkan seluruh belanja pada barang dan jasa akhir yang diproduksi perekonomian dalam satu tahun. Cara paaling mudah dalam memahami pendekatan pengeluaran pada GDP adalah membagi pengeluaran agregat menjadi empat komponen : konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor neto. Kita akan membahasnya satu per satu. Manurung (2008)

Konsumsi atau secara lebih spesifik pengeluaran konsumsi perorangan adalah pembelian barang dan jasa akhir oleh rumah tangga selama satu tahun. Konsumsi adalah belanja yang paling mudah dipahami dan juga bentuk belanja yang terbesar, yaitu sebesar dua pertiga dari GDP Amerika tahun 1990. Konsumsi meliputi pembelian jasa seperti *dry cleaning*, potong rambut, dan perjalanan udara, pembelian tidak tahan lama seperti sabun, sop, dan pembelian barang tahan lama seperti televisi dan mebel. Barang tahan lama adalah yang dapat digunakan paling tidak selama tiga tahun.

Investasi, atau secara spesifik *investasi domestik swasta bruto* adalah belanja pada barang kapital baru dan tambahan untuk persediaan. Secara lebih umum, investasi meliputi belanja pada produksi saat ini yang tidak digunakan pada saat ini. Bentuk investasi yang paling penting adalah kapital fisik baru, seperti bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Investasi juga meliputi pembelian konstruksi pemukiman baru. Meskipun investasi berfluktuasi dari tahun ke tahun, secara rata-rata investasi bernilai sepertujuh dari GDP Amerika selama tahun 1990-an.

Pembelian pemerintah, atau secara lebih spesifik *konsumsi dan investasi bruto pemerintah*, mencakup belanja semua tingkat pemerintahan pada barang dan jasa, dari pembersihan jalan bersalju sampai pembersihan ruang pengadilan, dari buku perpustakaan sampai upah petugas perpustakaan. Pembelian pemerintah bernilai hampir seperlima dari GDP Amerika selama tahun 1990-an. Pembelian pemerintah, dan juga GDP, tidak mencakup pembayaran tranfer, seperti social security, bantuan pemerintah kepada penerimaan bantuan dalam pengertian sebenarnya.

Komponen terakhir dari pengeluaran agregat adalah hasil interaksi antara perekonomian Amerika dan luar negeri. Ekspor neto sama dengan nilai ekspor barang dan jasa Amerika dikurangi impor barang dan jasa Amerika. Ekspor neto tidak hanya meliputi nilai perdagangan barang (yaitu barang yang dapat anda jatuhkan di atas kaki anda) tetapi juga jasa (invisibles, seperti pariwisata, asuransi, akuntansi dan konsultasi). Mengingat belanja untuk konsumsi, investasi dan pembelian pemerintah meliputi juga pembelian barang dan jasa, maka belanja tersebut tidak diperhitungkan sebagai bagian dari GDP Amerika, sehingga kita harus mengurangi impor dari ekspor untuk mendapatkan efek neto dari sektor luar negeri pada GDP. Nilai impor Amerika melebihi nilai ekspor hampir pada setiap selama beberapa dekade terakhir ini, yang berarti bahwa ekspor neto Amerika selama ini selalu negatif.

Dalam pendekatan pengeluaran, pengeluaran agregat negara sama dengan penjumlahan konsumsi (C), investasi (I), pembelian pemerintah (G), dan ekspor neto yaitu nilai ekspor (X), dikurangi dengan nilai impor (M), atau  $(X-M)$ . Penjumlahan komponen tersebut menghasilkan pengeluaran agregat, atau GDP

## **B. Metode Perhitungan GDP Berdasarkan Pendapatan**

Pendekatan pengeluaran menjumlahkan atau mengagregasikan pendapatan dari suatu produksi. Sistem pembukuan *double-entry* dapat memastikan bahwa nilai output agregat sama dengan pendapatan agregat yang dibayarkan untuk sumber daya yang digunakan dalam produksi output tersebut yaitu upah, bunga, sewa dan laba dari produksi. Harga *Hershey bar* mencerminkan pendapatan yang diterima semua pemilik sumber daya sehingga sehingga batangan permen tersebut sampai di rak grosir. Pendapatan agregat sama dengan semua penjumlahan

pendapatan yang diterima pemilik sumber daya dalam perekonomian (karena sumber dayanya digunakan dalam proses produksi). Jadi kita dapat mengatakan bahwa  $\text{Pengeluaran Agregat} = \text{GDP} = \text{Pendapatan Agregat}$

Suatu produk jadi biasanya diproses oleh beberapa perusahaan dalam perjalanannya menuju konsumen. Meja kayu, misalnya, mulanya sebagai kayu mentah, kemudian dipotong oleh perusahaan pertama, dipotong sesuai kebutuhan mebel oleh perusahaan kedua, dibuat meja oleh perusahaan ketiga, dan dijual oleh perusahaan keempat. *Double counting* dihindari dengan cara hanya memperhitungkan nilai pasar dari meja pada saat dijual kepada pengguna atau dengan cara menghitung nilai tambah dari setiap perusahaan sama dengan harga jual perusahaan tersebut dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan atas input dari perusahaan lain. Nilai tambah setiap tahap mencerminkan nilai tambah pada semua tahap produksi sama dengan nilai pasar barang akhir, dan penjumlahan nilai tambah seluruh barang dan jasa akhirnya adalah sama dengan GDP berdasarkan pendekatan pendapatan.

### **2.1.3. Pengeluaran Pemerintah**

Rudy Badrudin menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada dasarnya setiap pengeluaran negara dilakukan atas landasan prinsip optimalisasi pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan.

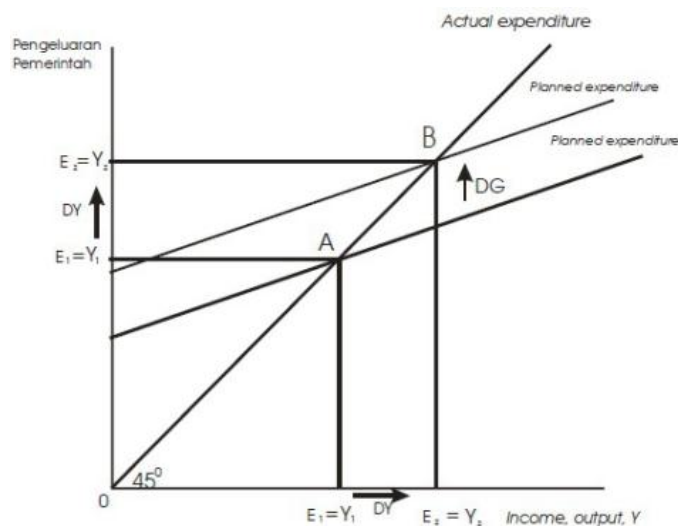
Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran 35 pembangunan. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/ hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga.

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Umumnya biaya pembangunan tersebut diprogramkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek di setiap sektor dan sub sektor. Pengeluaran pembangunan tersebut dialokasikan ke berbagai sektor sesuai dengan urutan prioritas dan kebijakan pembangunan (Pakasi, 2005).

### A. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1993; 169). Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003; 263).

**Grafik 2.1 Pengeluaran Pemerintahan Pada Keynesian Cross**



Sumber : Mankiw, 2003; 263

Pada grafik 2.1 dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y).

Bailey (1995; 43) membagi teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Model makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, 37 sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara particular komponen-komponen pengeluaran pemerintah. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesebroto, 1993; 169):

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.
2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah.
3. Teori Peacock & Wiseman.

#### **B. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**

Mangkoesebroto menjelaskan dalam bukunya bahwa model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas



pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

### C. Hukum Wagner

Hukum Wagner yang dijelaskan oleh Mangkoesoebroto mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, US dan Jepang pada abad ke 19, hukum tersebut berbunyi : dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner ini memiliki kelemahan karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangan dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$P_k PP_1 ( P_k PP_2 (... P_k PP_n$$

$$PPK_1 PPK_2 PPK_n$$

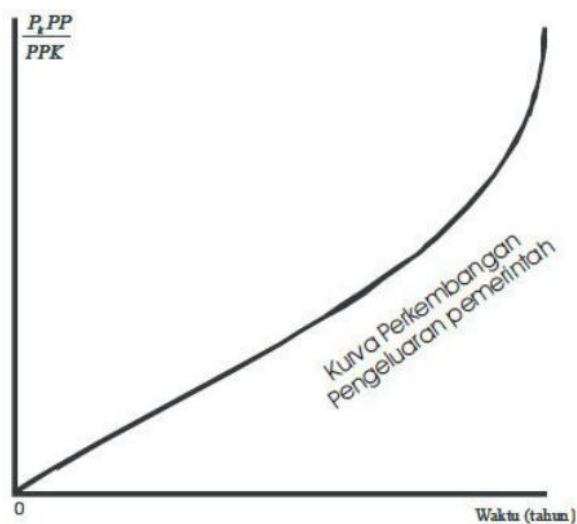
$P_k PP$  : Pengeluaran Pemerintah perkapita

$PPK$  : Pendapatan perkapita, yaitu GDP/ jumlah penduduk

1,2,...n : jangka Waktu (Tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam grafik 2.2 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 1993; 172).

Grafik 2.2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner



Sumber : Mangkoesoebroto, 1993; 172

#### D. Teori Peacock dan Wiseman

Dari ketiga teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah tersebut, teori Peacock & Wiseman dianggap sebagai teori dan model yang terbaik (Mangkoesoebroto : 173). Teori mereka sering disebut sebagai The Displacement Effect, dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Dalam Mangkoesoebroto (1993; 173) Peacock dan Wiseman 40 mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat

memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut (Mangkoesoebroto : 173) :

*“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.”*

Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi berbentuk seperti tangga.

#### **2.1.4. Regulasi**

##### **A. Kebijakan Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan alternatif pemecahan masalah kesenjangan pembangunan, terutama dalam konteks pemberdayaan pemerintah daerah yang selama ini dipandang hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Menurut UU No.22 tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah tersebut menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.

Otonomi daerah menurut UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, otonomi daerah pada hakekatnya adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi daerah otonom, artinya penetapan kebijakan sendiri, serta pembiayaan sendiri dan pertanggungjawaban daerah sendiri (Aser,2005).

Sistem pemerintahan republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuk daerah otonomi daerah yang terbagu dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf 1 dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa: “ Daerah Otonom”, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada masa sebelum otonomi daerah, semua wewenang pemerintah dipegang oleh pemerintah pusat, daerah hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah membuat wewenang pemerintah daerah semakin besar. Kewenangan daerah mencakup dalam bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,

pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konversi dan standarisasi nasional.

Prinsip pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah pada dasarnya untuk memberikan wewenang lebih besar kepada daerah agar dapat membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada masa sekarang ini titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada daerah tingkat II dan bukan kepada daerah tingkat I atau desa, karena pemerintah daerah tingkat II dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Menurut Arsyad (2005) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Otonomi daerah memiliki tiga asas pada prinsip pelaksanaan. Yaitu :

- A. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI
- B. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
- C. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada kepala daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber

daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Desentralisasi dari aspek fiskal merupakan otonomi keuangan yang meliputi pemberian wewenang penerimaan (*revenue assignment*) dan pengeluaran (*expenditure assignment*) yang memungkinkan daerah dapat memobilisasi sumber-sumber penerimaan dan meningkatkan kapasitas keuangan. Dengan desentralisasi, sebagian atau seluruh fungsi pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah. Pemerintah daerah membiayai pelaksanaan fungsi tersebut dengan PAD yang dihasilkan oleh setiap daerah. Dalam kenyataannya pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk membiayai pelaksanaan program-program daerah dan kegiatan pembangunan dengan hanya mengandalkan potensi PAD. Bantuan pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam menunjang pembangunan di daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya otonomi daerah pertumbuhan ekonomi daerah semakin kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1975 sudah mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Namun dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah dan wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjahfrizal, 1997). Desentralisasi fiskal yang tidak sekedar dekonsentrasi, baru dijalankan pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip

dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah “Money Follows Functions”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah.

Berdasarkan pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah merupakan mekanisme transfer Pusat ke daerah, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan. Besarnya PAD dan pembiayaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai dana non PKPD, karena berasal dari pengelolaan fiskal daerah. Khusus pinjaman daerah pemerintah pusat masih khawatir dengan kondisi utang negara, sehingga belum mengizinkan penerbitan utang daerah.

Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar otonom. Selama tahun 2001 – 2003 peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD semakin menurun. Menurunnya peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan pengeluaran total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan (Mahi, 2005). Tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (equalizing transfer) (Ehtisham, 2002). Secara umum dana perimbangan keuangan Pusat dan

daerah terdiri dari bantuan umum (block grant) dan bantuan khusus (specific grant) (Davey, 1998). Penggunaan DAU, DBHP dan DBH SDA (block grants) diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah. Pada awal penerapannya, DAU banyak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran rutin terutama untuk belanja pegawai sebagai dampak pengalihan status pegawai pusat menjadi pegawai pemda (Isdijoso dan Wibowo, 2002). Sedangkan penggunaan DAK (specific grants) telah ditentukan oleh Pusat dengan kewajiban daerah penerima harus menyediakan 10 persen dana pendamping.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu**

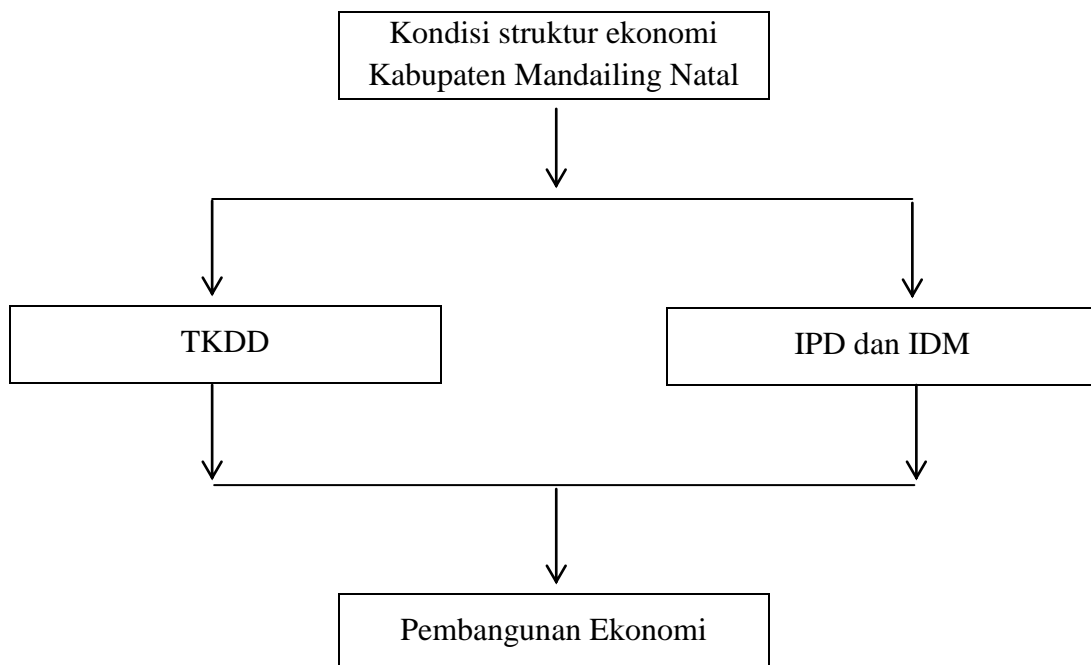
<b>Nama peneliti</b>	<b>Judul penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil penelitian</b>
Anggun Ciptasari Nurana	Analisis dampak kebijakan otonomi daerah terhadap ketimpangan perkembangan wilayah di kawasan ciayun aja kuning	rasio belanja pembangunan, tenaga kerja	Terkjadinya fluktuasi tingkat ketimpangan perkembangan wilayah selama 1995-2009 dengan total theil kawasan cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Tidak terdapat pengaruh signifikan dari pelaksanaan otonomi daerah terhadap pemerataan/penurunan ketimpangan perkembangan wilayah dengan hasil uji wilcoxon sebesar 0,500 pada masing-masing daerah dan 0,028 untuk total theil Ciayumajakuning, namun keduanya tidak mengindikasikan pemerataan.
Rizal Ramadhani	Pengaruh otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten Sukabumi	Total PDRB, sektor perekonomian, sektor pertanian,	Menunjukkan bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan rata-rata sektor perekonomian di Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan pada periode otonomi daerah sebesar 0,11 persen menjadi 9,20 persen pada masa otonomi daerah
Sihombing	Dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan sektor perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara	Sektor ekonomi	Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara sebelum otonomi daerah termasuk dalam kelompok pertumbuhan yang lambat, sesudah ada otonomi daerah, pertumbuhan ekonominya menjadi <i>progresif</i> (maju)



### 2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur dari suatu penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam operasional. Yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah melakukan analisis studi deskriptif tentang perkembangan struktur ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal pasca otonomi daerah.

**Gambar 2.1 kerangka pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian terapan yaitu penelitian yang menyangkut aplikasi teori pemecahan masalah tertentu.

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moleong, 2012:11). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh langsung dari observasi lapangan di tempat penelitian, dan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

#### **3.2 Tempat dan waktu penelitian**

##### **3.2.1 Tempat penelitian**

Tempat dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Mandailing Natal.

##### **3.2.2 Waktu penelitian**

Adapun waktu penelitian ini dilakukan adalah 3 bulan terhitung dari bulan November 2021 sampai dengan Januari 2021.

### **3.3 Jenis dan Sumber data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala numeric, sedangkan data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numeric. Pada umumnya data kualitatif yang bersifat data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat yang dibedakan menjadi data interval dan data rasio. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari pihak lain yang telah diproses dan dikumpulkan sebagai hasil atas penelitian yang dilaksanakan sumber data tersedut antara lain:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mandailing Natal.
2. Jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **3.3.1 Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data melalui website resmi kementerian keuangan (kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan data kurun waktu (*cross section*) di kabupaten Mandailing Natal. Kemudian penelitian kepustakaan (*library research*) juga dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan sebagai tolak ukur pada penelitian ini.

### **3.4 Teknik analisis data**

#### **3.4.1 Metode analisis deskriptif**

Metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian adalah analisis deskriptif. Deskriptif yaitu suatu metode analisis sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam

bentuk table, grafik, maupun narasi dengan tujuan untuk membudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 – 2021 dan perkembangan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Membangun Desa di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2014 - 2018.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal**

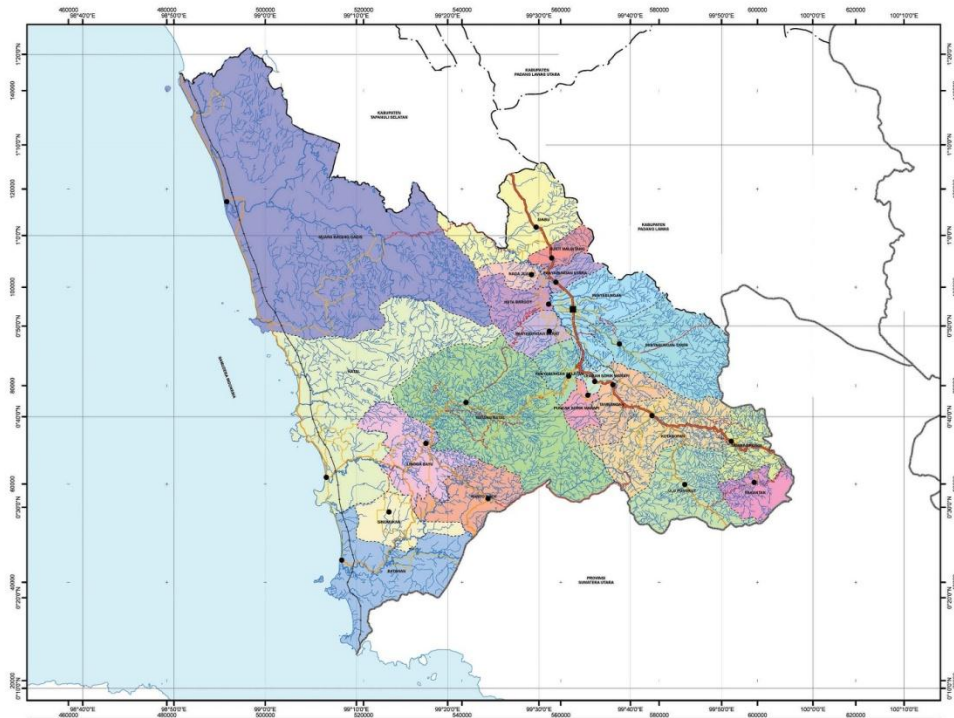
##### **4.1.1. Gambaran Geografi Kabupaten Mandailing Natal**

###### **a. Letak**

Kabupaten Mandailing Natal atau sering disebut *Madina* merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara. Dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 09 Maret 1999.

Berdasarkan posisi Geografis, Kabupaten Mandailing Natal berada dibagian selatan wilayah provinsi Sumatera Utara yang secara geografis terletak pada  $0^{\circ}10'-1^{\circ}50'$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}10'-100^{\circ}10'$  Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal  $\pm 6.620,70$  km<sup>2</sup> atau 9,23 persen dari wilayah Sumatra Utara. Mandailing Natal memiliki batas-batas wilayah. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Berikut ini Gambar Peta Kabupaten Mandiling Natal.

**Gambar 4.1 Peta Kabupaten Mandailing Natal**



Sumber : Madina.go.id

### **b. Luas Wilayah**

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan, 27 kelurahan, dan 377 desa dengan luas wilayah mencapai 662,070,00 (Ha) dan jumlah penduduk sekitar 480.911 jiwa (2016) dengan kepadatan penduduk 78 jiwa/km<sup>2</sup>.

### **c. Iklim**

Kabupaten Mandailing Natal termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Kabupaten Mandailing Natal Suhu udara berkisar antara 23 °C - 32 °C dengan kelembaban antara 80–85%. Curah hujan disuatu tempat dipengaruhi oleh iklim, keadan tofografi, dan perputaran/ pertemuan arus udara.

Oleh karena itu curah hujan beragam menurut bulan dan wilayah tiap kecamatan. Pada tahun 2013 curah hujan maksimum terjadi pada bulan Desember yaitu 3.140 mm dan curah hujan minimum terjadi pada bulan Januari berkisar 584 mm. Rata-rata jumlah curah hujan di Kabupaten Mandailing Natal ini adalah 1.654 mm/tahun. Kecamatan Muarasipongi merupakan kecamatan dengan curah hujan tertinggi yaitu 3.022 mm/ tahun sedangkan curah hujan terendah terjadi di kecamatan Panyabungan Utara yaitu 2.172 mm/tahun.

Gugusan Bukit Barisan merupakan sumber mata air sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Mandailing Natal. Ada 6 sungai besar bermuara ke samudra Hindia diantaranya adalah; Batang Gadis 137,5 Km, Siukangaling 46,8 Km, Perlampungan 38,72 Km, Tabuyung 33,46 Km, Batahan 27,91 Km, Kunkun 27,26 Km, dan sungai-sungai lainnya kira-kira 271,15 Km. Keberadaan sungai-sungai itu Ekonomi Pembangunan –FEB UMSU 73 membuktikan bahwa daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah daerah yang subur dan menjadi lumbung pangan bagi wilayah sekitarnya.

#### **4.1.2. Kondisi Topografi Kabupaten Mandailing Natal**

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari gugusan pegunungan dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Barisan di beberapa kecamatan, juga daerah pesisir/daerah pantai di Kecamatan Batahan, Natal, dan Muara Batang Gadis. Daerah Kabupaten Mandailing Natal dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Dataran rendah merupakan daerah pesisir, kemiringan 00 – 20 seluas 160.500 Ha (24,24%).

2. Daerah/dataran landai, kemiringan 20 – 150 seluas 36.385 Ha (5,49%)
3. Dataran Tinggi, kemiringan 150 – 400 . Dataran tinggi terdiri 2 jenis, yaitu
  - a. Daerah perbukitan, kemiringan 150 – 200 seluas 112.000 Ha (16,91%)
  - b. Daerah pegunungan, kemiringan 200 – 400 seluas 353.185 Ha (53,34%).

#### 4.1.3. Perkembangan Indikator sosial

##### A. Penduduk/ Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan data yang dihasilkan dari Survei Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan pusat Statistik sebanyak 472.886 dimana angka tersebut bertambah 67.941 jiwa dibandingkan dengan hasil survey penduduk tahun 2010. 472.886 jiwa yang terdiri dari 235.487 jiwa penduduk laki-laki dan 237.408 penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbesar berada pada Penyabungan sebanyak 90,049 jiwa, Angka sex ratio penduduk Kabupaten Mandailing Natal adalah sebesar 99,2. Sex ratio adalah banyaknya penduduk laki-laki dalam 100 orang perempuan.

**Tabel 4.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, 2020**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Batahan	11393	11116	22509	102,5
2.	Sinunukan	11020	10507	21527	104,9
3.	Batang natal	12737	12596	25333	101,1
4.	Lingga Bayu	13684	13683	27576	101,5
5.	Ranton Baik	2338	6913	14085	103,7
6.	Kotanopan	5246	14187	27871	96,5
7.	Ulu Pungkut	2338	2336	4674	100,1
8.	Tambangan	5246	5667	10913	92,6
9.	Lembah Sorik Marapi	5396	5572	10968	96,8
10.	Puncak Sorik Marapi	4468	4507	8975	99,1



11.	Muara Sipongi	6283	6245	12528	100,6
12.	Pakantan	1142	1080	2222	105,7
13.	Panyabungan	44533	45516	90049	97,8
14.	Panyabungan Selatan	5002	5321	10323	94,0
15.	Panyabungan Barat	5256	5421	10677	97,0
16.	Panyabungan Utara	11221	11352	22573	98,8
17.	Panyabungan Timur	7112	7102	14214	100,1
18.	Huta Bargot	4316	4432	8748	97,4
19.	Natal	17113	16784	33897	102,0
20.	Muara Batang Gadis	11412	10910	22322	104,6
21.	Siabu	26048	27238	53286	95,6
22.	Bukit Malintang	6297	6474	12771	97,3
23.	Naga Juang	2396	2449	4845	97,8
<b>Mandailing Natal 2020</b>		<b>235478</b>	<b>237408</b>	<b>472886</b>	<b>99,2</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Madina 2020

Dari 23 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, wilayah Kecamatan Penyabungan merupakan Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah 90049 jiwa dengan rasio 97,8, yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 44533 jiwa dan perempuan sebanyak 45516 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua yaitu Kecamatan Siabu dengan jumlah penduduk sebesar 53286 jiwa dengan rasio 95,6, dengan jumlah jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 26048 dan perempuan sebesar 27238. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu Kecamatan Ulu Pungkut dengan jumlah penduduk sebesar 4674 jiwa dengan rasio 100,1, jumlah yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 2338 jiwa dan yang berjenis perempuan yaitu sebesar 2336 jiwa. Sedangkan kecamatan kedua yang memiliki jumlah penduduk yang terendah yaitu Kecamatan Naga Juang dengan jumlah penduduk sebesar 4845 Jiwa dengan rasio 97,8, yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 2396 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 2449 jiwa.

**Tabel 4.2 Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, 2020**

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per KM <sup>2</sup>
1.	Batahan	2206	4,76	45
2.	Sinunukan	21527	4,55	125
3.	Batang natal	25333	5,36	39
4.	Lingga Bayu	27576	5,83	143
5.	Ranton Baek	14085	2,98	92
6.	Kotanopan	27871	5,89	86
7.	Ulu Pungkut	4674	0,99	16
8.	Tambangan	10913	2,31	69
9.	Lembah Sorik Marapi	10968	2,32	316
10.	Puncak Sorik Marapi	8975	1,90	162
11.	Muara Sipongi	12528	2,65	92
12.	Pakantan	2222	0,47	24
13.	Panyabungan	90049	19,04	347
14.	Panyabungan Selatan	10323	2,18	118
15.	Panyabungan Barat	10677	2,26	122
16.	Panyabungan Utara	22573	4,77	354
17.	Panyabungan Timur	14214	3,01	36
18.	Huta Bargot	8748	1,85	75
19.	Natal	33897	7,17	36
20.	Muara Batang Gadis	22322	4,72	16
21.	Siabu	53286	11,27	154
22.	Bukit Malintang	12771	2,70	186
23.	Naga Juang	4845	1,02	83
	<b>Madina</b>	<b>472886</b>	<b>100,0</b>	<b>71</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Madina 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari 23 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, wilayah Kecamatan Panyabungan merupakan Kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Mandailing Natal mempunyai jumlah penduduk sebesar 90049 jiwa, sehingga memiliki kepadatan penduduk sebesar 347 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan kedua yang memiliki jumlah kepadatan penduduk adalah Kecamatan

Siabu dengan jumlah penduduk 53286 jiwa sehingga kepadatannya adalah 154 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kecamatan Ulu Pungkut yang merupakan Kecamatan yang mempunyai penduduk terendah yaitu 4674 jiwa sehingga kepadatan penduduknya sebesar 16 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan kedua yang mempunyai kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Naga Juang dengan jumlah penduduk sebesar 4845 jiwa sehingga mempunyai kepadatan penduduk sebesar 83/Km<sup>2</sup>. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Mandailing Natal relatif belum merata.

### **B. Tenaga Kerja**

Pengangguran yang tinggi, penyediaan lapangan kerja baru dan produktivitas tenaga kerja yang rendah adalah permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat penanganan yang sangat serius dari pemerintah. Permasalahan ketenagakerjaan tersebut jika tidak segera diatasi akan dapat menimbulkan dampak sosial dalam kehidupan masyarakat. Beberapa indikator mengenai ketenagakerjaan juga dapat dijadikan sebagai ukuran atau barometer keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi maupun pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran. Namun dalam kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menciptakan lapangan kerja baru sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa disebabkan karena peningkatan jumlah tenaga kerja jauh lebih tinggi dibandingkan penyediaan lapangan kerja baru dan penggunaan teknologi yang relatif kurang padat karya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dipacu oleh pertumbuhan konsumsi dan bukan karena penanaman modal baru (investasi) dan perluasan usaha. Pertumbuhan ekonomi seharusnya diiringi

dengan peningkatan produktivitas. Tetapi hal itu juga kadang kala sulit tercapai karena pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan pertumbuhan tenaga kerja dan peningkatan tenaga kerja tidak diikuti dengan peningkatan output per tenaga kerja yang memadai. Pemilihan teknologi yang padat karya harus lebih diutamakan untuk lebih dapat menyerap pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tinggi.

Permasalahan ketenagakerjaan harus mendapatkan perhatian lebih serius dikarenakan besarnya dampak yang timbul akibat kurangnya penyerapan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Pengangguran (angkatan kerja yang tidak bekerja) yang tinggi akan berkaitan langsung terhadap meningkatnya permasalahan sosial yang lain, di antaranya masalah kriminalitas yang meningkat dan permasalahan kemiskinan yang akan cenderung meningkat pula. Salah satu cara dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan adalah dengan mengencangkan program-program pemerintah dalam penyediaan pendidikan, seperti mengadakan program-program pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan program kewirausahaan bagi para pencari kerja. Dalam hal ini, kewajiban pencari kerja untuk mendaftar di Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu persyaratan administrasi pada proses perekrutan pegawai di dunia usaha cukup memberikan ruang bagi pemerintah untuk memonitor kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Mandailing Natal.

#### 4.1.4. Perkembangan Indikator Ekonomi

**Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal (Miliar Rupiah) 2015-2019**

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	4.271,58	4.689,25	5.158,32	5.497,99	5.819,71
Pertambangan Dan Penggalian	61,1	71,62	72,91	77,08	83,43
Industri Pengolahan	986,33	1.123,50	1.302,82	1.426,42	1.550,42
Pengadaan Listrik Dan Gas	6,72	7,40	8,30	9,05	9,51
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	2,06	2,22	2,43	2,58	2,79
Konstruksi	1.230,04	1.381,69	1.511,68	1.671,49	1.839,81
Perdagangan Besar Dan Eceran, Refarasi Mobil Dan Sepeda Motor	1.312,05	1.493,89	1.637,61	1.795,71	1.968,61
Transportasi Dan Pergudangan	188,33	214,99	225,54	244,23	260,40
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	74,43	81,36	85,91	93,55	100,86
Informasi Dan Komunikasi	72,84	76,76	81,75	87,13	89,12
Jasa Keuangan Dan Asuransi	145,47	159,89	168,34	174,17	180,66
Real Estate	265,63	295,39	311,19	336,52	351,53
Jasa Perusahaan	10,44	11,01	11,96	12,53	13,51
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	753,60	826,34	894,80	931,82	1.001,95
Jasa Pendidikan	121,83	134,29	142,60	153,21	160,91
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	80,81	86,97	92,51	100,46	107,04
Jasa Lainnya	3,16	3,48	3,84	4,11	4,48
<b>PDRB</b>	<b>9.586,34</b>	<b>10.660,04</b>	<b>11.712,51</b>	<b>12.618,05</b>	<b>13.544,74</b>

Sumber: BPS Mandailing Natal, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, di tahun 2015 sebesar 9.586,34 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 10.656,12 miliar rupiah, di tahun 2017 sebesar 11.712,51 miliar rupiah sedangkan

di tahun 2018 yaitu sebesar 12.618,05 miliar rupiah dan di tahun 2019 sebesar 12.541,05 miliar rupiah. Lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar untuk PDRB setiap tahunnya itu sector pertanian dimana ditahun 2015 sebesar 4.271,58, di tahun 2016 sebesar 4.689,25, di tahun 2017 yaitu sebesar 5.158,32, sedangkan di tahun 2018 sebesar 5.497,99 dan di tahun 2019 yaitu sebesar 5.819,71. Sedangkan untuk lapangan usaha yang paling sedikit berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Mandailing Natal yaitu lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang dimana di tahun 2015 sebesar 2,06, tahun 2016 sebesar 2,22, ditahun 2017 yaitu sebesar 2,43 sedangkan ditahun 2018 sebesar 2,85 dan ditahun 2019 yaitu sebesar 2,79. Lapangan usaha penyumbang terbesar terhadap kenaikan jumlah PDRB yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Di tahun 2015 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang terhadap PDRB sebesar 4.271,58 miliar rupiah, tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 4.689,25 miliar rupiah, tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi 5.158,32 miliar rupiah sedangkan ditahun 2018 terus mengalami kenaikan sehingga menjadi 5.497,99 miliar rupiah dan di tahun 2019 menjadi 5.819,71 miliar rupiah. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan nelayan di Kabupaten Mandailing Natal.

**Gambar 4.2 PDRB Kabupaten Mandailing Natal Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Atas Dasar Harga Konstan, Dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015-2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Madina

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat perkembangan PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan, di tahun 2015 sebesar 9.586,34 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 10.656,12 miliar rupiah, di tahun 2017 sebesar 11.712,51 miliar rupiah sedangkan di tahun 2018 yaitu sebesar 12.618,05 miliar rupiah dan di tahun 2019 sebesar 13.541,05 miliar rupiah. Sedangkan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019, di tahun 2015 jumlah PDRB ADHK yaitu sebesar 7.473,72 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 7.933,13 miliar rupiah, di tahun 2017 sebesar 8.416,50 miliar rupiah sedangkan di tahun 2018 yaitu sebesar 8.904,14 miliar rupiah, dan di tahun 2019 sebesar 9.376,46 miliar rupiah, dengan laju pertumbuhan di tahun 2015 sebesar 6,21%, tahun 2016 sebesar 6,18%, di tahun 2017 sebesar 6,09% sedangkan di tahun 2018

yaitu sebesar 5,79% dan di tahun 2019 yaitu sebesar 5,30%.

#### **4.2. Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Kabupaten Mandailing Natal**

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah dan desa sebagai tindak lanjut program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah dan desa yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.



**Tabel 4.4 Transfer ke Daerah dan Dana Desa Kabupaten Mandailing Natal  
2019 – 2021**

	2019	2020	2021
<b>TRANSFER KE DAERAH</b>	<b>1.181,77 M</b>	<b>1.005,32 M</b>	<b>1.164,34 M</b>
Dana Bagi Hasil	31,77 M	27,64 M	75,80 M
DBH Cukai Hasil Tembakau	0,19 M	0,16 M	0,14 M
DBH PBB Bagi Rata	3,74 M	2,71 M	6,06 M
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	12,78 M	5,84 M	35,56 M
DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	0,79 M	0,25 M	1,80 M
DBH PPh Pasal 21	6,45 M	6,95 M	9,24 M
DBH PPh Pasal 25/29 OP	0,46 M	0,86 M	0,73 M
DBH SDA Gas Bumi 0,5%	0,00 M	0,00 M	0,00 M
DBH SDA Gas Bumi 30%	0,05 M	0,15 M	0,02 M
DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	0,04 M	-	-
DBH SDA Kehutanan – PSDH	0,33 M	0,62 M	0,97 M
DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	1,58 M	3,24 M	6,48 M
DBH SDA Minerba – Royalti	3,10 M	1,66 M	5,08 M
DBH SDA Minyak Bumi 0.5%	0,00 M	0,00 M	0,00 M
DBH SDA Minyak Bumi 15%	0,10 M	0,08 M	0,00 M
DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	0,50 M	3,80 M	6,62 M
DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	0,97 M	0,51 M	1,42 M
DBH SDA Perikanan	0,69 M	0,79 M	1,67 M
Dana Alokasi Umum	822,45 M	754,95 M	742,35 M
Dana Alokasi Umum	822,45 M	754,95 M	742,35 M
Dana Alokasi Khusus Fisik	144,77 M	57,85 M	149,44 M
Dana Alokasi Khusus Penugasan	17,40 M	20,68 M	92,83 M
Dana Alokasi Khusus Reguler	127,36 M	37,17 M	56,61 M
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	182,79 M	164,89 M	196,75 M
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	7,06 M	7,41 M	7,32 M
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	29,79 M	27,00 M	30,33 M
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	3,80 M	3,05 M	3,11 M
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	5,00 M	5,42 M	5,44 M
Dana Fasilitas Penanaman Modal	-	-	0,33 M
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-	0,38 M
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1,70 M	1,71 M	1,53 M
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	-	-	0,39 M
Dana Pelayanan Kepariwisata	0,08 M	-	-
Sipil	0,72 M	0,35 M	0,51 M
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	14,52 M	8,98 M	24,15 M

Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	120,13 M	110,98 M	123,27 M
DANA DESA	285,84 M	286,85 M	286,85 M
Dana Desa	285,84 M	286,85 M	286,85 M
Dana Desa	285,84 M	286,85 M	286,85 M
TOTAL TKDD	1.467,62 M	1.292,17 M	1.451,18 M

Sumber : kemenkeu, 2021 (<https://djk.kemenkeu.go.id/>)

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Mandailing Natal setiap tahun memperoleh dana Transfer ke Daerah berkisar 1,1 Triliun. Dimana, pada tahun 2019 kabupaten Mandailing Natal memperoleh anggaran 1.181,77 M dan pada 2021 memperoleh anggaran sebesar 1.164,34 M. Pada tahun 2020 saat pandemic covid-19 melanda Indonesia anggaran Transfer ke Daerah mengalami penurunan menjadi 1.005,32 M. Hal tersebut dikarenakan adanya relokasi anggaran pemerintah pusat dalam menanggulangi wabah covid-19 terlihat dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) turun dari 31,77 M pada tahun 2019 menjadi 27,64 M pada 2020, Dana Alokasi Umum dari 822,45 M menjadi 754,95 M dan penurunan paling besar terjadi pada Dana Alokasi Khusus Fisik dari 144,77 M pada tahun 2019 menjadi 57,85 M pada tahun 2020 artinya terjadi penurunan lebih dari 50%.

Apabila kita lihat dari proporsi anggaran yang lainnya terdapat beberapa perubahan pada struktur anggaran TKDD kabupaten Mandailing Natal. Dimana, pada DBH SDA Kehutanan – Dana Reboisasi dan Dana Pelayanan Kepariwisata telah dihapuskan dari struktur anggaran TKDD yang mana pada tahun 2019 DBH SDA Kehutanan – Dana Reboisasi mendapat anggaran sebesar 0,04 M dan Dana Pelayanan Kepariwisata mendapat anggaran 0,08 M keduanya telah dihapus dari struktur TKDD Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020 dan 2021

Pada anggaran tahun 2021 pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal

mendapat beberapa penambahan DAK Nonfisik jenis baru yaitu :

1. Fasilitas Penanaman Modal

Dana Fasilitas Penanaman Modal adalah untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di daerah masing-masing. Kabupaten Mandailing Natal mendapat anggaran sebesar 0,33 M.

2. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dialokasikan dalam rangka untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian. Dimana, kabupaten Mandailing Natal mendapat anggaran sebesar 0,38M

3. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi

Dana ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM KOperasi dan UKM di setiap wilayah. Dimana, kabupaten Mandailing Natal mendapat anggaran sebesar 0,39 M.

**Tabel 4.5 Alokasi Dana Desa Kabupaten di Sumatera Utara tahun 2015 - 2020**

KABUPATEN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nias Selatan	33.379.260	272.337.292	346.818.470	314.481.751	348.422.333	356.099.164
Deli Serdang	27.634.246	237.763.644	303.060.286	271.906.373	306.386.948	312.277.329
Simalungun	24.579.935	230.404.778	294.047.540	259.232.136	294.442.204	298.689.733
Padang Lawas Utara	28.216.020	225.561.557	288.081.911	254.318.741	287.244.660	293.516.929
Mandailing Natal	24.870.821	222.908.920	284.048.518	252.910.057	285.841.420	290.920.103
Padang Lawas	22.034.675	178.229.984	228.176.371	204.748.115	230.097.858	233.549.721
Langkat	17.453.208	151.029.055	192.863.823	178.799.190	205.446.268	211.213.265
Karo	18.544.034	153.840.310	196.336.126	173.021.882	197.078.926	201.208.286
Tapanuli Utara	16.871.434	142.031.302	180.698.826	164.129.846	184.186.164	194.621.304
Serdang Berdagai	17.235.043	144.302.850	183.489.815	162.911.520	184.774.302	187.834.594
Nias	24.870.203	103.736.501	132.926.248	148.261.931	180.585.127	181.381.215

Toba Samosir	8.072.109	136.530.337	173.463.727	154.311.189	176.101.238	179.571.269
Tapanuli Selatan	16.507.826	127.063.126	161.670.006	145.856.856	167.751.279	172.034.790
Asahan	12.726.298	111.404.032	141.972.561	126.570.894	146.090.415	150.506.325
Tapanuli Tengah	10.762.812	96.562.993	123.393.234	121.058.197	140.541.973	144.349.335
Nias Utara	8.144.830	72.284.380	91.824.194	110.728.448	137.008.319	137.596.573
Dairi	9.744.708	98.210.643	126.096.790	111.910.524	127.172.564	130.304.470
Humbang Hasundutan	11.126.420	92.610.146	117.513.286	105.690.046	123.336.297	126.028.454
Batu Bara	10.108.316	89.109.409	113.377.356	104.583.228	118.843.171	121.643.028
Nias Barat	7.999.387	65.419.884	83.734.696	92.269.401	114.000.248	118.531.988
Samosir	8.072.109	78.867.498	100.027.803	90.921.937	108.744.499	109.313.044
Labuhan Batu Utara	6.035.901	53.813.253	65.464.939	68.036.521	79.123.527	83.576.158
Labuhan Batu	5.545.128	48.622.618	62.369.282	60.371.923	70.226.102	72.182.696
Labuhan Batu Selatan	3.781.528	36.783.045	46.022.462	46.205.735	61.548.371	65.076.224
Pakpak Barat	3.781.528	33.755.307	42.483.881	40.948.983	48.298.630	50.424.120

Sumber : Kementerian keuangan Republik Indonesia Tahun 2020 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Berdasarkan sampel di atas, Dana Desa paling besar di Kabupaten Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2015 yaitu Kabupaten Nias Selatan dengan total sebesar Rp. 33.379.260 Juta dan Dana Desa yang terendah pada Kabupaten Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2015 yaitu Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan total sebesar Rp. 3.781.528 Juta. Pada tahun 2016 Kabupaten Nias Selatan juga sebagai penerima Dana Desa Terbesar di Provinsi Sumatera utara dengan total sebesar Rp. 272.337.292 Juta, sedangkan penerima Dana Desa terendah di tahun 2016 yaitu Kabupaten Pakpak Barat sebesar Rp. 33.755.307 Juta. Kabupaten Nias Selatan tetap menjadi Penerima Dana Desa tertinggi di Tahun 2017 sebesar Rp. 346.818.470 Juta dan Dana Desa terendah di tahun 2017 adalah Kabupaten Pakpak Barat dengan total Rp. 42.483.881 Juta.

Dilihat pada tahun 2018 dan tahun 2019 Kabupaten Nias Selatan tetap menjadi penerima Dana Desa terbesar di Provinsi Sumatera Utara dengan total sebesar Rp. 314.481.751 Juta dan Rp. 348.422.333 Juta dan yang menjadi penerima Dana Desa terendah pada tahun 2018 dan 2019 yaitu Kabupaten Pakpak

Barat dengan total sebesar Rp. 40.948.983 Juta dan Rp. 48.298.630 Juta.

Kabupaten Mandailing Natal terletak pada urutan ke 5 penerima Dana Desa Tertinggi dari tahun 2016 hingga 2020, berikut merupakan diagram Alokasi Dana Desa Kabupaten Mandailing Natal.

**Grafik 4.1 Alokasi Dana Desa Kabupaten Mandailing Natal 2015 – 2020 (ribu rupiah)**



Sumber : *Kementrian keuangan Republik Indonesia Tahun 2020 (diolah)*

Kabupaten Mandailing Natal menempati urutan ke 5 Penerima Dana Desa tertinggi dari tahun 2016 hingga 2020. Dimana pada tahun 2016 kabupaten Mandailing Natal mendapat alokasi dana desa sebesar Rp. 222.908.920.000 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 284.048.518.000 Hingga pada tahun 2020 mencapai Rp. 290.920.103.000.

Sesuai dengan Nawacita butir ketiga yakni „Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan“ diwujudkan dalam berbagai pendekatan mengatasi ketimpangan. Maka Kebijakan Dana Desa diharapkan mampu mendongkrak perekonomian di daerah sehingga dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi di wilayah pedesaan.

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen Pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Pembangunan Perdesaan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan .

#### **4.3. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) Pada Wilayah Kabupaten Mandailing Natal**

##### **4.3.1. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Pada Wilayah Kabupaten Mandailing Natal**

Konsep Indeks Membangun Desa (IDM) sendiri kemudian dijelaskan dalam Peraturan Kementrian Desa (Permendes) No. 2 Tahun 2016 tentang pola dan peta pengembangan pembangunan desa. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa konsep IDM terintegrasi dari beberapa kategori di dalamnya yang meliputi: Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Dari ketiga faktor tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi dalam proses pengukuran strata kemandirian dan kemajuan suatu desa.

Berdasarkan konteks tipologi desa, Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: “(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri”. Dari kelima klasifikasi tersebut maka kini statrta desa sudah memiliki

beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa. Tipologi pembagian Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dibagi ke beberapa hal seperti: (1) desa sangat tertinggal:  $< 0,491$ ; (2) desa tertinggal:  $> 0,491$  dan  $< 0,599$ ; (3) desa berkembang:  $> 0,599$  dan  $< 0,707$ ; (4) desa maju:  $> 0,707$  dan  $< 0,815$ ; dan (5) desa mandiri:  $> 0,815$ ” (Suroso, 2019).

Tipologi tersebut sejalan dengan Permendes No. 6 Tahun 2016 yang mengatur peta pembangunan desa. Pertama adalah desa sangat tertinggal atau desa tertinggal. Karakteristik desa ini memiliki beberapa konsep dalam pembangunannya seperti: pertama pengembangan, pengadaan, dan pemeliharaan dan kedua pengembangan sarana pembangunan terhadap aktivitas perekonomian dalam rangka mengadakan kegiatan baik itu produksi, distribusi, dan pemasaran. Selain itu untuk mendukung pengelolaan perekonomian desa pembentukan usaha ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui pengelolaan BUMDes sebagai aset yang dimiliki oleh desa.

Kedua adalah desa berkembang yang memiliki beberapa karakteristik meliputi: pembangunan serta pengembangan seluruh infrastruktur perekonomian mulai dari produksi, retribusi, dan pemasaran serta berusaha untuk dapat menjadi lumbung pangan dan usaha perekonomian masyarakat desa. Dalam hal pemeliharaan infrastruktur desa desa berkembang berusaha untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa hingga dapat melakukan pelayanan terhadap masyarakat desa. Untuk mendorong hal tersebut penguatan perekonomian desa didukung oleh BUMDes sebagai akses perekonomian mulai dari pemberian modal, pengelolaan usaha, proses distribusi, dan terakhir proses pemasaran yang kesemuanya dipandu oleh pemerintah desa dalam rangka membantu

perekonomian dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.

Ketiga adalah desa maju atau desa mandiri yang dicirikan sebagai sebuah desa yang memiliki baik itu pembangunan, pengembangan serta pemeliharaannya infrastruktur desa yang berbasis pada angka produktifitas yang difokuskan dalam sebuah produk unggulan. Proses pemberdayaan dan pemeliharaan infrastruktur didukung atas proses pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan ketahanan pangan bagi masyarakat desa. Pengelolaan aset desa didukung oleh produktifitas dari BUMDes yang berusaha untuk dapat melakukan suatu produksi, retribusi, dan pemasaran yang baik dan didukung oleh kualitas masyarakat desa dengan tujuan sebagai mata pencarian dan pengaktifan perekonomian masyarakat sekitar (Mohammad Soekarno, 2020).

Indikator desa membangun setidaknya ada 3 (tiga) dimensi yang dijelaskan di dalam Buku Indeks Desa Membangun Kemendes sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Indikator Variabel Dimensi Indeks Membangun Desa (IMD)**

No.	Dimensi	Variabel
1.	Ketahanan Sosial	Modal Sosial
		Kesehatan
		Pendidikan
		Pemukiman
2.	Ketahanan Ekologi	Kualitas lingkungan
		Potensi rawan bencana
		Tanggap bencana
		Keragaman produksi masyarakat desa
3.	Ketahanan Ekonomi	Tersedianya Pusat perdagangan
		Akses distribusi dan logistic
		Akses ke lembaga keuangan
		Lembaga Ekonomi
		Keterbukaan wilayah



Adapun Indeks Desa Membangun (IDM) per Desa pada Tahun 2020 yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Indeks Membangun Desa (IDM) Pada Kabupaten Mandailing Natal**

No	Kabupaten	Desa Mandiri	Desa Maju	Desa Berkembang	Desa Tertinggal	Desa Sangat Tertinggal	Total IDM
1	Simalungun	2	7	107	210	49	0.5693

*Sumber: www.idm.go.id*

Berdasarkan tabel di atas, secara umum pertama Kabupaten Mandailing Natal Memiliki 377 Desa dengan total Indeks Membangun Desa (IMD) keseluruhan sebesar 0.5693 dan masuk ke dalam kategori Tertinggal. Dimana, terdapat 2 desa yang masuk dalam kategori Desa Mandiri, 7 desa masuk dalam kategori desa Maju, 107 desa masuk ke dalam kategori desa berkembang, 210 desa masuk dalam kategori desa tertinggal dan 49 lainnya masuk dalam kategori desa sangat tertinggal.

#### **4.3.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) Pada Wilayah Pedesaan Di Kabupaten Mandailing Natal**

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa-desa di Indonesia. Di Indonesia sendiri, percepatan pembangunan desa berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur. Beberapa pembangunan yang telah dilakukan adalah pembangunan embung, jalan desa, jembatan, pasar desa, penahan tanah, tambatan perahu, air bersih, drainase, saluran irigasi, hingga tempat mandi cuci kakus (MCK) dan sumur. Pembangunan juga mencakup aktivitas ekonomi sosial seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), pembangunan tempat olah raga desa, pembangunan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Polindes (Pondok Bersalin

Desa), Posyandu (Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu), serta infrastruktur lainnya. Hal tersebut konsisten dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) menjadi 5 (lima) dimensi dengan disesuaikan dengan ketersediaan data/variabel dalam data Potensi Desa 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar yaitu mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Variabel yang termasuk sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA; serta ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas/pustu, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes, dan apotek.
2. Kondisi Infrastruktur yaitu mewakili Kebutuhan Dasar; Sarana; Prasarana; Pengembangan Ekonomi Lokal; dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/ transportasi. Variabel-variabel penyusunnya mencakup ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti: kelompok pertokoan, minimarket, toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan, serta bank; ketersediaan infrastruktur energi seperti: listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar untuk memasak; ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti: sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar; serta ketersediaan dan kualitas

infrastruktur komunikasi dan informasi seperti: komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.

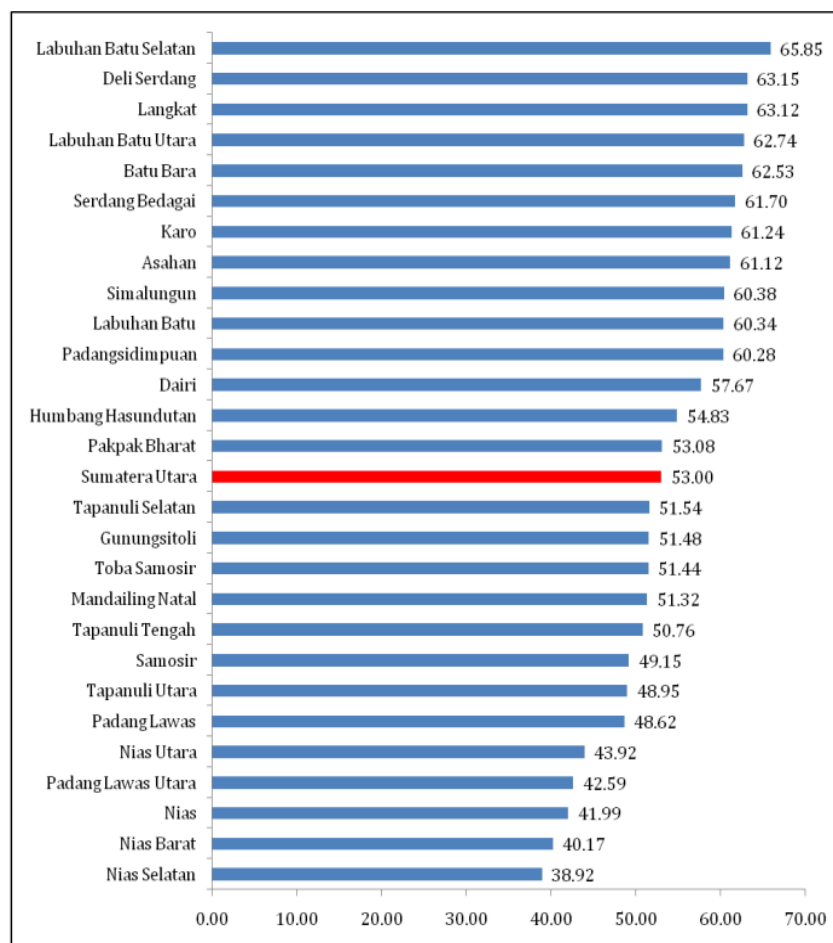
3. Aksesibilitas/Transportasi yaitu dipisahkan sebagai dimensi tersendiri dalam indikator pembangunan desa dengan pertimbangan sarana dan prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa. Variabel-variabel penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti: lalu lintas dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan umum; dan aksesibilitas transportasi seperti: waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat, biaya per kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor bupati/ walikota, dan biaya per kilometer transportasi ke kantor bupati/walikota. Indikator jarak antara desa dengan pusat pemerintahan ini merujuk dari variabel yang tercantum dalam Potensi Desa 2018, dengan asumsi bahwa pada umumnya pusat kegiatan sosial-ekonomi suatu kawasan berada di sekitar/dekat pusat- pusat pemerintahan.
4. Pelayanan Umum yaitu upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Karena kekhususannya, variabel pelayanan administratif dinyatakan sebagai dimensi tersendiri (Penyelenggaraan Pemerintahan). Begitupun dengan variabel pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya menjadi dimensi tersendiri yang telah dijelaskan sebelumnya. Pelayanan dalam

dimensi ini mewakili aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada ketersediaan data Potensi Desa 2018. Aspek lingkungan dalam hal ini terkait dengan kesehatan lingkungan masyarakat, sedangkan aspek pemberdayaan masyarakat diwakili dengan keberadaan kelompok kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, variabel-variabel penyusun dimensi ini mencakup penanganan kesehatan masyarakat seperti: penanganan kejadian luar biasa (KLB), dan penanganan gizi buruk; serta ketersediaan fasilitas olah raga seperti: ketersediaan lapangan olah raga, dan kelompok kegiatan olah raga.

5. Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Oleh karena itu variabel ini perlu diukur dan berdiri sendiri sebagai sebuah indikator pembangunan desa, karena sifatnya sebagai perangkat terlaksananya tujuan pembangunan desa tersebut. Variabel-variabel penyusunnya meliputi kemandirian seperti: kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan asset/kekayaan desa; serta kualitas sumber daya manusia seperti: kualitas SDM kepala desa dan sekretaris desa.

Berkaitan Indeks Pembangunan Desa (IPD) Provinsi Sumatera Utara beberapa tahun belakangan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2014 dan tahun 2018. Adapun Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 yakni, sebagai berikut:

**Grafik 4.2 Indeks Pembangunan Desa (IPD) Sumatera Utara Tahun 2014**



(Sumber: Podes BPS, 2018)

Dari data diatas dapat terlihat bahwa kabupaten yang memiliki indeks pembangunan desa paling tinggi di sumatera utara adalah kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan taraf 65,85 dan posisi kedua di tempati oleh kabupaten Deli Serdang dengan taraf 63,15, sedangkan kabupaten Mandailing natal indeks pembangunan desa cukup rendah hanya sebesar 51,32, dimana IPD tersebut masih dibawah rata-rata IDP Sumatera Utara dengan taraf 53,00.

**Tabel 4.8 Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) Sumatera Utara Tahun 2014**

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Nias	41,99	39,14	25,56	66,05	44,72	40,82	80,59	19,41	0,00	170
Mandailing Natal	51,32	50,26	33,15	78,96	48,18	48,01	40,32	59,68	0,00	377
Asahan	61,12	64,80	52,04	69,73	56,92	59,19	3,95	94,92	1,13	177
Simalungun	60,38	61,14	49,67	80,46	48,04	57,65	10,36	87,56	2,07	386
Dairi	57,67	65,18	38,57	82,12	41,74	49,61	11,94	88,06	0,00	134
Karo	61,24	62,56	45,11	87,90	42,89	63,20	10,98	86,67	2,35	255
Deli Serdang	63,15	66,10	51,85	78,33	51,04	64,18	10,53	75,53	13,95	380
Langkat	63,12	67,96	50,17	74,30	53,59	67,21	4,17	93,75	2,08	240
Nias Selatan	38,92	39,51	20,53	58,27	39,84	42,61	84,97	15,03	0,00	459
Humbang Hasundutan	54,83	51,73	38,96	84,95	40,36	59,02	29,41	69,93	0,65	153
Pakpak Bharat	53,08	61,69	33,53	73,28	39,16	48,70	32,69	67,31	0,00	52
Samosir	49,15	49,70	33,78	73,55	38,62	48,02	58,59	41,41	0,00	128
Serdang Bedagai	61,70	66,41	51,99	72,73	52,13	59,03	7,17	90,72	2,11	237
Batu Bara	62,53	69,01	51,55	78,67	48,66	52,22	2,13	97,87	0,00	141
Padang Lawas Utara	42,59	36,90	27,98	72,02	43,30	37,68	69,95	30,05	0,00	386
Padang Lawas	48,62	49,69	31,46	75,78	44,49	38,45	58,75	40,92	0,33	303
Labuhan Batu Selatan	65,85	69,30	50,07	82,54	65,08	61,57	0,00	96,15	3,85	52
Labuhan Batu Utara	62,74	68,54	46,62	76,12	57,90	62,53	4,88	92,68	2,44	82
Nias Utara	43,92	45,94	23,79	64,19	47,36	43,13	73,21	26,79	0,00	112
Nias Barat	40,17	39,75	21,41	58,30	45,81	45,33	87,62	12,38	0,00	105
Padang Sidempuan	60,28	69,25	39,80	81,37	44,99	56,69	4,76	95,24	0,00	42
Gunungsitoli	51,48	61,07	35,31	65,47	39,70	45,87	45,92	54,08	0,00	98
<b>Sumatera Utara</b>	<b>53,00</b>	<b>54,34</b>	<b>38,15</b>	<b>74,58</b>	<b>46,01</b>	<b>49,97</b>	<b>37,15</b>	<b>61,22</b>	<b>1,63</b>	<b>5.389</b>

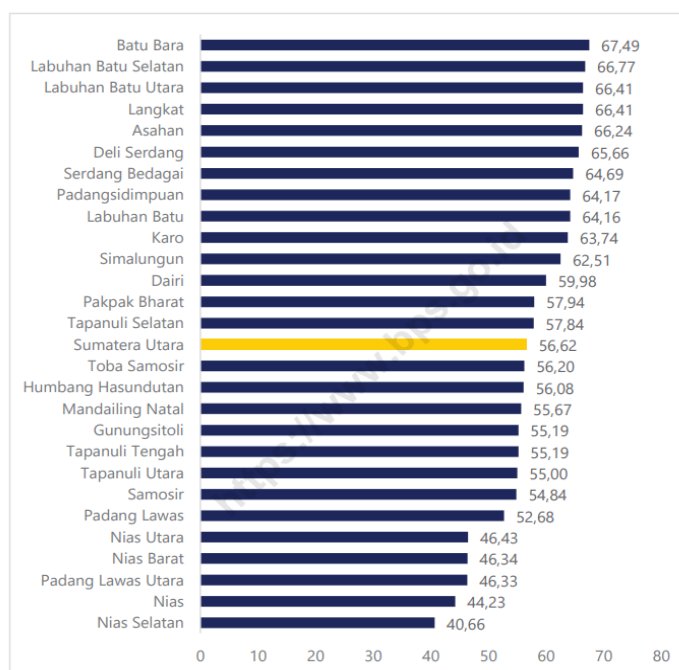
(Sumber: Podes BPS, 2014)

Berdasarkan tabel dimensi IPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 di atas, maka Kabupaten Mandailing Natal dengan total Desa sebanyak 377 Desa memiliki sistem Pelayanan Dasar yang mencapai taraf 50,26 dengan Kondisi Infrastruktur sebesar 33,15 serta tingkat Aksesibiliti/Transportasi sebesar 78,96 dan Pelayanan Umum memiliki taraf 48,18 dan pelaksanaan Penyelenggaraan

Pemerintahan yang sudah berjalan sebesar 48,01. Adapun tingkat presentase klasifikasi desa di Kabupaten Simalungun yang masih terklasifikasi sebagai desa tertinggal sebesar 40,32 sedangkan desa berkembang sebesar 59,68 dan desa mandiri sebesar 0,00.

Selanjutnya, jika melihat hasil IPD Sumatera Utara Tahun 2018, maka tergambar sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Indeks Pembangunan Desa (IPD) Sumatera Utara Tahun 2018**



(Sumber: Podes BPS, 2018)

Dari data diatas dapat terlihat bahwa kabupaten yang memiliki indeks pembangunan desa paling tinggi di sumatera utara adalah kabupaten Batu Bara dengan taraf 67,49 dan posisi kedua di tempati oleh kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan taraf 66,77, sedangkan kabupaten Mandailing natal indeks pembangunan desanya masih dibawah rata-rata Sumatera Utara yaitu sebesar 56,08, sedangkan rata-rata IDP Sumatera Utara adalah 56,62.

**Tabel 4.10 Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) Sumatera Utara Tahun 2018**

Nama Pulau	IPD 2018	Dimensi IPD					Persentase Desa Menurut Status Desa			Jumlah Desa
		Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Humbang	56,08	49,13	43,06	86,30	41,59	65,05	21,57	75,82	2,61	153
Hasundutan										
Pakpak Bharat	57,94	60,82	40,02	79,12	40,94	68,21	19,23	78,85	1,92	52
Samosir	54,84	51,54	39,67	79,46	42,15	66,57	30,47	68,75	0,78	128
Serdang Bedagai	64,69	65,73	56,57	76,38	53,88	69,31	3,38	89,87	6,75	237
Batu Bara	67,49	71,01	56,70	80,66	54,33	70,45	0,00	91,49	8,51	141
Padang Lawas Utara	46,33	39,62	30,90	72,91	48,18	50,58	60,36	39,38	0,26	386
Padang Lawas	52,68	50,19	35,54	77,72	50,52	55,10	39,93	59,08	0,99	303
Labuhan Batu Selatan	66,77	66,44	53,61	85,18	64,76	65,84	1,41	88,73	9,86	71
Labuhan Batu Utara	66,41	69,93	52,93	76,67	61,83	72,48	2,44	86,59	10,98	82
Nias Utara	46,43	44,83	22,40	70,34	54,92	53,65	66,07	33,93	0,00	112
Nias Barat	46,34	46,23	23,12	66,46	46,36	62,78	65,71	34,29	0,00	105
Padangsidempuan	64,17	68,32	44,82	92,08	48,60	59,96	2,38	95,24	2,38	42
Gunungsitoli	55,19	58,20	39,44	74,50	45,16	56,53	23,47	76,53	0,00	98
Nias	44,23	39,28	25,91	67,76	50,94	50,76	74,12	25,29	0,59	170
Mandailing Natal	55,67	53,77	37,09	82,03	50,62	60,09	23,61	75,86	0,53	377
Tapanuli Selatan	57,84	53,76	37,42	87,02	48,35	72,24	14,15	85,85	0,00	212
Tapanuli Tengah	55,19	56,71	36,03	80,06	46,66	56,96	26,42	73,58	0,00	159
Tapanuli Utara	55,00	51,97	43,09	78,65	41,63	60,85	28,63	70,95	0,41	241
Toba Samosir	56,20	50,64	46,37	77,95	44,58	66,59	21,21	77,92	0,87	231
Labuhan Batu	64,16	65,55	49,15	77,95	64,81	68,35	1,33	90,67	8,00	75
Asahan	66,24	68,73	55,14	77,22	56,94	73,26	0,56	93,79	5,65	177
Simalungun	62,51	61,35	51,25	81,05	50,42	69,46	5,18	91,19	3,63	386
Dairi	59,98	59,18	42,90	84,74	45,86	69,76	9,32	89,44	1,24	161
Karo	63,74	62,66	46,83	91,41	48,56	69,62	6,18	89,96	3,86	259
Deli Serdang	65,66	66,35	54,90	81,83	55,76	68,20	6,84	72,11	21,05	380
Langkat	66,41	68,12	55,19	78,78	55,21	75,34	0,83	92,08	7,08	240
Nias Selatan	40,66	36,58	22,99	65,64	44,90	42,83	80,39	19,61	0,00	459

(Sumber: Podes BPS, 2018)

Berdasarkan tabel dimensi IPD Sumatera Utara Tahun 2018 dapat dianalisis bahwa Kabupaten Mandailing Natal dengan total Desa sebanyak 377 Desa memiliki sistem Pelayanan Dasar yang mencapai taraf 53,77 dengan Kondisi Infrastruktur sebesar 37,09 serta tingkat Aksesibiliti/Transportasi sebesar 82,03



dan Pelayanan Umum memiliki taraf 50,62 dan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang sudah berjalan sebesar 60,09.

Jika melihat perbandingan kedua dimensi IPD pada Kabupaten Mandailing Natal yang dihitung pada Tahun 2014 dan Tahun 2018. Maka terlihat perbandingan sebagai berikut:

**Tabel 4.14. Indeks Pembangunan Desa (IPD) Pada Kabupaten Mandailing Natal 2014 dan 2018**

No	Kabupaten	IPD	2014					IPD	2018				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mandailing Natal	51,32	50,26	33,15	78,96	48,18	48,01	55,67	53,77	37,09	82,03	50,62	60,09
2	Sumatera Utara	53,00	54,34	38,15	74,58	46,01	49,97	56,62	54,94	41,71	78,33	49,76	62,43

(Sumber: Kemendes, 2019)

Berdasarkan tabel perbandingan IPD di atas, terlihat bahwa indikator-indikator pembangunan desa seperti: pelayanan dasar, infrastruktur, aksesbiliti/trasportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan terjadi peningkatan antara IPD tahun 2014 ke IPD tahun 2018 pada Kabupaten Mandailing natal. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa IPD perbandingan tahun tersebut mengalami perkembangan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kabupaten Mandailing Natal menempati urutan ke 5 Penerima Dana Desa tertinggi dari tahun 2016 hingga 2020. Dimana pada tahun 2016 kabupaten Mandailing Natal mendapat alokasi dana desa sebesar Rp. 222.908.920.000 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 284.048.518.000 Hingga pada tahun 2020 mencapai Rp. 290.920.103.000.
2. Kabupaten Mandailing Natal Memiliki 377 Desa dengan total Indeks Membangun Desa (IMD) keseluruhan sebesar 0.5693 dan masuk ke dalam kategori Tertinggal. Dimensi IPD Sumatera Utara Tahun 2018 dapat dianalisis bahwa Kabupaten Mandailing Natal dengan total Desa sebanyak 377 Desa memiliki sistem Pelayanan Dasar yang mencapai taraf 53,77 dengan Kondisi Infrastruktur sebesar 37,09 serta tingkat Aksesbiliti/Transportasi sebesar 82,03 dan Pelayanan Umum memiliki taraf 50,62 dan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang sudah berjalan sebesar 60,09.

#### **5.2. Saran**

Adapun saran yang penulis dapat berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal harus mampu memaksimalkan anggaran dana desa untuk memastikan kesejahteraan masyarakat sehingga


hal ini akan meningkatkan indikator Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM)

2. Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal melalui Pemerintahan Desa harus mampu memanfaatkan segala potensi yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal 2016 dan 2020*. Mandailing Natal : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 1969 – 2019*. Badan Pusat Statistik.
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Kemenkeu. 2021. *Perkembangan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 – 2021*. Dirjen Perimbangan Keuangan 2020 ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id))
- Kemenkeu. 2020. *Pengalokasian Dana Desa di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2020*. Dirjen Perimbangan Keuangan 2020 ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id))
- Kuncoro, Mudrajat. 2014. “ Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3”. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Lokadata. 2020. *Indeks Desa Membangun*. Diakses melalui [lokadata.com](http://lokadata.com)
- Mankiw N, Gregory, dkk. 2012, *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.

- Nugroho, S. A. E. (2009). *Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode Tahun 1983–2007 Dengan Pendekatan Error Correction Model* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Rohman, A., Sukiman, A., & Trihardianto, W. (2021). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pelayanan Publik. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 3(1), 71-84.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi (edisi Kesembilan, jilid I)* Jakarta : Erlangga.


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jl. Kapten Mukhtar Baer No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

---

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 174/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/22/2/2021

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan**  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 di Medan

Medan, 22/2/2021

Dengan hormat,  
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Andri muhammad idris  
 NPM : 1705180036  
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
 Konsentrasi : Perencanaan pembangunan daerah

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Penyaluran dana desa terhadap kawasan wisata sampuraga kec.panyabungan barat, sumatra utara

Rencana Judul :
 

1. Evaluasi kebijakan dana desa pada kawasan wisata sampuraga kec.Panyabungan barat. Kab.panyabungan barat, sumatra utara.
2. Analisis perkembangan struktur ekonomi dan pedesaan di kabupaten madina pasca kebijakan otonomi daerah tahun 2000
3. Dampak sektor pertanian terhadap desa hutabaringin kec.panyabungan barat

Objek/Lokasi Penelitian : Kec.panyabungan barat

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
 Pemohon  
  
 (Andri muhammad idris)

Lembaran ini dibagikan satu persatu sesuai nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.

Halaman ke 1 dari 2 halaman

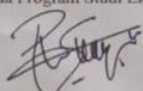
**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 28238

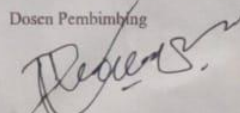
**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 174/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/22/2/2021

Nama Mahasiswa : Andri muhammad idris  
 NPM : 1705180036  
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
 Konsentrasi : Perencanaan pembangunan daerah  
 Tanggal Pengajuan Judul : 22/2/2021  
 Nama Dosen pembimbing\*) : Prawidya H rs.

Judul\*\*) : Analisis Perkembangan indeks Pembangunan Desa (IPD) dan (IDM) Indeks Desa Membangun di kabupaten Mandailing Natal Tahun (2020)

Disahkan oleh:  
 Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan  
  
 (Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, .....  
 Dosen Pembimbing  
  
 (Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Keterangan:  
 \*) Ditau oleh Pimpinan Program Studi  
 \*\*) Ditau oleh Dosen Pembimbing  
 Lembar disahkan oleh Pridi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah halaman ke-2 ini pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"

Informasi ini dipergunakan oleh juri nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online. Halaman ke 2 dari 2 halaman



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : Andri Muhammad Idris  
N.P.M : 1705180036  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Judul Skripsi : Analisis Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan IDM (Indeks Desa Membangun) di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
15/8/21	Bab I revisi banyak, tambahkan data = 4 mendukung, struktur yg da		
9/9/21	Bab I : Kembangkan dgn rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian yg telah ditetapkan.		
17/10-21	Bab II revisi lagi 4 uraian yg lebih jelas. Uraian teori hrs pakai Text books dan rujukan pakai Peraturan Pemerintah dan PP.		
20/11-21	Bab III lebih banyak ditanyakan 4 Pembahasan Deskriptif, shg cara penulisan yg tujuan penelitian sdh dapat terjawab		
13/12-21	Revisi Bab I, II, III sdh dapat BCC 4 Seminar Proposal.		

Medan, Desember 2021

Unggul | Cerdas | Terampil

Pembimbing

Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 6624567 Ext: 304 Medan

20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**

Pada hari ini 6 Januari 2022 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan  
yang diiringi dengan bahwa :

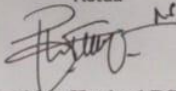
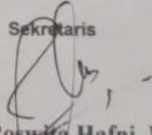
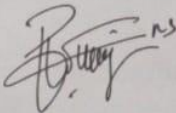
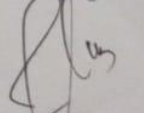
Nama : **Andri Muhammad Idris**  
N.P.M. : **1705180036**  
Tempat / Tgl.Lahir : **Bangko, 20 Januari 1998**  
Alamat Rumah : **Jl. Bukit Barisan**  
Judul Proposal : **Analisis Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan IDM  
(Indeks Desa Membangun) di KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2020**

Disetujui / tidak disetujui \*)


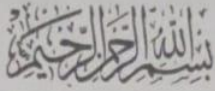
Item	Komentar
Judul	—
Bab I	+ pengantar deskriptor masalah di latar belakang.
Bab II	+ Reruleri kety otomasi paas.
Bab III	—
Lainnya	—
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 6 Januari 2022

**TIM SEMINAR**

<p>Ketua</p>  <p>Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.</p>	<p>Sekretaris</p>  <p>Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.</p>
<p>Pembimbing</p>  <p>Dr. Prawidya Hariani Rs., SE., M.Si</p>	<p>Pembimbing</p>  <p>Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.</p>

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext. 304 Medan 220238

**PENGESAHAN PROPOSAL**

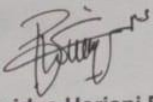
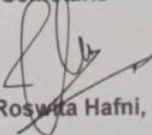
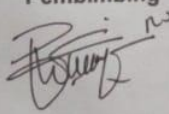
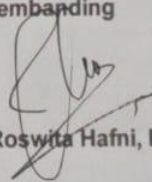
Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **6 Januari 2022** menerangkan bahwa:

**Nama** : Andri Muhammad Idris  
**N .P.M.** : 1705180036  
**Tempat / Tgl.Lahir** : Bangko, 20 januari 1998  
**Alamat Rumah** : Jl. Bukit Barisan  
**JudulProposal** : Analisis Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan IDM (Indeks Desa Membangun) di KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2020

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Dr. Prawidya Hariani Rs., SE., M.Si*

Medan,

**TIM SEMINAR**

<p style="text-align: center;"><b>Ketua</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sekretaris</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pembimbing</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pembanding</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.</p>

Diketahui / Disetujui  
 A.n. Dekan  
 Wakil Dekan - I

Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ANDRI MUHAMMAD IDRIS  
N.P.M : 1705180036  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD) DAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2020


Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
09 / Juli 2022	Perbaiki pendahuluan dan tambahkan 10M 2018 dan 2019		
15 / Juli 2022	Tambahkan di landasan teori mengenai regulasi SDGs		
18 / Juli 2022	Ubah variabel bebas dan tambahkan variabel, tentukan definisi operasional		
30 / Agt 2022	Perbaiki data data, tambahkan R-Squared dan gambar IPD tahun 2019, tambahkan Daftar pustaka dan Perbaiki Daftar Isi		
28 / Agt 2022	Acc : sedang. Meja hijau		

dan Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

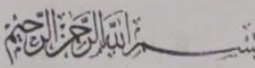
Medan, September 2022  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**  
 Berkedudukan Berdasarkan Keputusan Permental dan Keputusan Rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
**Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567**  
 © <http://perpustakaan.umsu.ac.id> | [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) | [perpustakaan.umsu.ac.id](https://www.perpustakaan.umsu.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 1414/ KET/IL3-AU /UMSU-P/M/2022



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

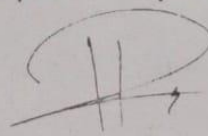
<b>Nama</b>	<b>: Andri Muhammad Idris</b>
<b>NPM</b>	<b>: 1705180036</b>
<b>Fakultas</b>	<b>: Ekonomi dan Bisnis</b>
<b>Jurusan</b>	<b>: Ekonomi Pembangunan</b>

Untuk menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 17 Muharam 1444 H  
 15 Agustus 2022 M

**Kepala UPT Perpustakaan**



Assoc. Prof. Muhammad Arifin, M.Pd.